



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN SEKJEN, IRJEN, KEPALA BPSDM-PMDDTT, KEPALA BPID-
DDTT KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 13.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom
Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. (F-PPP) – Wakil
Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2022
2. Membahas Program Kerja Tahun 2023
3. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR
RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
41 dari 56 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
8 dari 12 orang Anggota
 1. Mochamad Herviano
 2. Sukur H. Nababan, S.T.
 3. Ir. Sudjadi
 4. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
 5. Sri Rahayu
 6. Ir. Effendi Sianipar
 7. Harvey B. Malaihollo
 8. Djenri Alting Keintjem, S.H., M.H.
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. Cen Sui Lan
 4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
 5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
 6. Ilham Pangestu
 7. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
6 dari 7 orang Anggota
 1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Ir. Sumail Abdullah
 3. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 5. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
 6. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
 4. Sri Wahyuni

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
4 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 4. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
2 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 2. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
 3. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.
 4. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Athari Ghauthi Ardi
 2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 3. H. Boyman Harun, S.H.
 4. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota

1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI (Taufik Madjid, S.Sos., M.Si.)
2. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI (Ir. Eko Sri Haryanto, MM)
3. Kepala BPSDM-PMDDTT Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI (Prof. Dr. Luthfiah Nurlaela, M.Pd.)
4. Kepala BPID-DDTT Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI (Dr. Ivanovich Agusta, S.P., M.Si.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F – PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E, M.Com):

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang saya hormati Anggota Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati Saudara Sekjen,
Saudara Irjen,
Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan
Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi beserta
Seluruh jajarannya,
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti rapat dengan para Eselon I dan Sekjen, serta Anggota Komisi V sekalian.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V Anggota yang hadir berjumlah 20 orang, fisik 5 orang, dan *virtual* 15 orang, jumlah Fraksi 6 Fraksi, artinya bahwa rapat ini sudah kuorum berdasarkan jumlah Fraksi. Oleh karena itu, maka izinkan saya untuk membuka rapat ini.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Sekjen, Irjen, dan para Kepala Badan Kementerian Tertinggal dan Transmigrasi beserta

jajarannya, yang telah memenuhi undangan kami dalam Rapat Dengar Pendapat kami pada hari ini.

**Anggota Komisi V DPR RI,
Sekjen,
Irjen, dan
Para Kepala Badan, serta
Yang berbahagia,**

Untuk agenda yang pertama, terkait evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2022, Komisi V DPR RI ingin mendapatkan penjelasan Sekjen, Irjen, dan para Kepala Badan bagaimana hasil akhir pencapaian realisasi anggaran masing-masing unit Eselon I pada Tahun 2022, sesuai saran dan masukan yang telah diberikan oleh Komisi V DPR RI, pada rapat-rapat sebelumnya.

Adapun terkait dengan agenda kedua, yaitu pembahasan program kerja Tahun Anggaran 2023. Perlu kami sampaikan bahwa, Pagu Anggaran Sekjen, Sekretaris Jenderal sebesar 221,17 miliar, Irjen sebesar 49,67 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar 1,78 triliun dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar 131,33 miliar.

Dengan *angulasi*...dengan alokasi anggaran ini, kami ingin mengetahui bagaimana Pagu Anggaran ini direalisasikan sesuai dengan rencana program kegiatan yang sudah disampaikan pada rapat-rapat terdahulu. Selanjutnya, kami ingin pula mendapatkan penjelasan tentang rencana *automatic adjustment* dalam masing-masing unit organisasi Eselon I tersebut.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI terdapat sejumlah isu yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain yang pertama Sekretariat Jenderal agar dapat meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam rangka terwujudnya perencanaan pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang lebih efektif dan efisien.

Yang kedua, Inspektorat Jenderal agar selalu meningkatkan pengawasan internal dan meminimalisir temuan-temuan atau permasalahan penggunaan keuangan, sehingga tidak mengakibatkan kerugian negara.

Ketiga, Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu meningkatkan pelatihan bagi masyarakat desa dan memberikan penguatan kapasitas kepada pendamping desa.

Keempat, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu meningkatkan pengelolaan data dan informasi desa agar selalu potensi desa dapat dikembangkan untuk menuju desa yang lebih sejahtera.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Saya kira demikianlah pengantar dari kami, selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Pak Sekjen, kepada Irjen, dan kepada para Kepala Badan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilakan yang pertama dari Pak Sekjen, silakan Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam damai sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, selaku Pimpinan Rapat Dengar Pendapat pada pagi hari ini yang kami hormati dan kami muliakan, Seluruh Anggota Komisi V yang kami hormati, kami muliakan baik yang hadir langsung maupun hadir secara *virtual*, Salam sehat untuk kita semua,

Mohon izin, kami, didampingi hari ini bersama-sama pada hari pertama RDP dengan Komisi V, saya sendiri, Taufik Madjid Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan memaparkan, pertama Evaluasi Pelaksanaan APBN untuk Tahun 2022 dan rencana program serta Anggaran Tahun 2023.

Yang kemudian, mohon izin dan perkenan Pimpinan dan Anggota akan dilanjutkan masing-masing, yang pertama oleh Pak Eko Sri Haryanto pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kementerian, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Nurlaela, Ibu Luthfiah Nurlaela Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan yang terakhir nanti oleh Bapak Ivanovic Agusta, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kami juga didampingi oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang ada di belakang kami.

Mohon izin, kami mulai dari Sekretariat Jenderal. Untuk Tahun Anggaran 2022, realisasi penyerapan anggaran di Sekretariat Jenderal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi *alhamdulillah* kita atas saran, masukan, rekomendasi dari Komisi V sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 penyerapan anggaran di Sekretariat Jenderal yang meliputi 6 biro: Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Umum dan Layanan Pengadaan, serta Biro Keuangan dan badan...mohon maaf, barang milik negara dari anggaran Rp210.546.974.000,- realisasinya Rp209.718.400.000,- atau 99,61%.

Realisasi ini, *alhamdulillah* bisa sedikit di atas prognosis yang pernah kami laporkan di Komisi V DPR RI, ini. Ini berkat dukungan, masukan sekali lagi, dan rekomendasi dan *insya* Allah semuanya kami lakukan dengan penuh kehati-hatian, terutama kualitas belanja yang kami lakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, sehingga kurva S, terhadap rencana penarikan dana *alhamdulillah* bisa berkesesuaian dengan RPD yang di...kita tetapkan sama-sama dengan Kementerian Keuangan.

Adapun capaian *output* di lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2022. Secara umum, di Biro Hukum realisasinya 100% atas dua layanan, yaitu layanan advokasi hukum atau litigasi terhadap tujuh kasus selama kurun waktu 2022 dan advokasi nonlitigasi terhadap eksekusi aset negara terutama di Balai Bengkulu dan Balai Makassar.

Kemudian, capaian *output* di Biro Hukum yaitu, fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan ini realisasinya 100%. Kami *alhamdulillah* telah berhasil menyusun 404 peraturan yang terdiri dari 12 Peraturan Menteri Desa, 143 keputusan Menteri Desa, 236 keputusan Sekretaris Jenderal, 4 surat edaran Menteri, 7 surat edaran Sekjen, dan 2 instruksi Menteri Desa.

Capaian *output* yang lain adalah penelaahan dan evaluasi Peraturan Menteri targetnya satu kegiatan dan realisasinya 100% yaitu, penerapan rencana aksi reformasi birokrasi dengan mengimplementasikan metode *regulatory impact assessment* atau RIA, pada evaluasi peraturan. RIA ini mohon izin, Pimpinan dan Anggota adalah satu upaya yang di-*assess* atas peraturan atau regulasi yang diterbitkan oleh kementerian, apa *output* dan dampak dari regulasi yang kami terbitkan. Ini kita lakukan terhadap enam peraturan yang telah kami terbitkan.

Kemudian, capaian *output* berikutnya adalah *legal drafting* naskah perjanjian hukum, itu realisasinya 100% berupa kami fasilitasi atas *legal drafting* terhadap naskah kerja sama yang terdiri dari 9 dokumen *memorandum of understanding* yang ditandatangani oleh Menteri, 20 MoU yang ditandatangani oleh Sekjen, serta 63 perjanjian kerja bersama oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Yang kedua, untuk biro hubungan masyarakat Pagunya 11,3 miliar semuanya realisasi 100% antara lain, yang pertama penyiapan bahan kehumasan dan perancangan humas secara internal berupa dokumen *blue print institutional branding*, laporan analisa opini publik, laporan survei kepuasan masyarakat, laporan pengaduan masyarakat, dan permohonan informasi yang kami berikan, serta regulasi terkait dengan sentra layanan informasi masyarakat yang kami lakukan secara terpadu yang diberi nama 'Selaras' ini tercapai 100%.

Kemudian, untuk layanan pemberitaan dan publikasi tercapai 100% berupa publikasi rilis dan infografis dilakukan berbagai media seperti *website*,

Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, media luar ruang, media cetak, dan televisi, yaitu iklan layanan masyarakat.

Kemudian, capaian *output* yang lain di humas Ini adalah layanan dokumentasi dan perpustakaan. Kami punya perpustakaan desa yang ada di Kantor Kalibata, melayani berbagai *stakeholder* dari layanan ini *alhamdulillah* bisa kami berikan informasi terkait dengan pembangunan desa, pedesaan, dan daerah tertinggal, serta transmigrasi.

Kemudian, layanan hubungan kelembagaan targetnya 28 kerja sama, semuanya bisa kami capai yaitu kerja sama dengan enam Kementerian/Lembaga, lima dengan organisasi atau lembaga swasta, 16 perguruan tinggi, dan satu dengan Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian, terhadap layanan pengaduan juga realisasinya 100% terdapat 925 aduan dengan rincian 895 aduan yang kami tindaklanjuti, 28 aduan sedang diproses dan dua aduan baru yang dalam proses juga untuk ditindaklanjuti.

Yang ketiga, di biro perencanaan dan kerja sama, Pagu 22,2 miliar capaian *output*-nya berupa antara lain: satu, layanan perencanaan dan manajemen kinerja targetnya satu layanan realisasinya 100% antara lain layanannya adalah menghasilkan tujuh dokumen yang terdiri dari dokumen perjanjian kinerja, *review* indikator kinerja utama, *input* RKP untuk tahun 2023, rencana aksi SAKIP Kementerian, rencana aksi SAKIP Sekretariat Jenderal, *review* Renstra Kementerian, serta *updating* peta risiko.

Layanan berikutnya adalah perencanaan program dan anggaran Kementerian, targetnya bisa kami realisasikan 100% yaitu menghasilkan *output* 11 dokumen perencanaan anggaran yang terdiri dari tiga dokumen rencana kerja kementerian dan delapan dokumen DIPA RKA K/L.

Berikutnya adalah layanan dukungan manajemen P3PD, pinjaman luar negeri dari World Bank atau Bank Dunia, 100% kami realisasikan, layanan...kemudian, berikutnya adalah layanan perencanaan program dan kerja sama berupa empat fasilitas dokumen kerja sama bilateral, satu konsep *note* pembentukan ASEAN *village network*, kemudian 62 dokumen perjanjian kerja bersama, 83 berita acara kabupaten DAK transportasi pedesaan, serta fasilitasi kegiatan kerja sama luar negeri.

Yang berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, serta kegiatan realisasinya 100% berupa laporan KSP, *e-monev* untuk P39, nilai kinerja anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran, rencana aksi lintas Kementerian/Lembaga, bahan pidato presiden, kemudian laporan kinerja kementerian, laporan semester dan laporan tahunan.

Untuk Biro Kepegawaian dan Organisasi Pagu 2022, 19,09 miliar layanannya antara lain, layanan perencanaan di bidang kepegawaian kami menghasilkan tiga *output* dokumen berupa dokumen data dan media informasi kepegawaian, dokumen rekrutmen dan pengangkatan, serta dokumen pola

karir formasi, dan kebutuhan pegawai untuk lima tahun yang akan datang atau *manpower planning*.

Layanan berikut dari Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah layanan pengembangan kepegawaian, realisasi 100% *output*-nya antara lain dokumen penyelenggaraan *assessment centre* bagi pegawai. Kami ingin mendapatkan basis data tentang potensi pegawai yang ada di kementerian, kemudian dokumen standar kompetensi jabatan, dokumen *monitoring* dan evaluasi penerapan sistem *merit*, kemudian dokumen penyelenggaraan manajemen talenta, serta dokumen penyusunan rencana kinerja dan penilaian kinerja pegawai.

Layanan berikut adalah layanan pembinaan organisasi dan tata laksana berupa, kami, berhasil menyusun Peraturan Menteri Desa tentang Bisnis Proses Kementerian, yang dituangkan dalam peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2022.

Layanan berikutnya adalah di layanan administrasi kepegawaian, realisasinya 100%, kami menghasilkan tiga *output* dokumen, yang pertama pemrosesan kenaikan pangkat, Karis, Karsu, Karpeg, izin atau tugas belajar, pencantuman gelar, pemberian pensiun, dan peninjauan masa kerja pegawai sebagai layanan yang harus kami berikan kepada seluruh staf.

Dokumen berikut adalah layanan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian, kemudian dokumen penyelesaian masalah-masalah di bidang kepegawaian.

Berikutnya adalah Biro Umum dan Layanan Pengadaan Pagu 2022 101,8 miliar, layanan seluruhnya tercapai 100%, berupa layanan sarana internal, berupa pengadaan sarana bidang teknologi informasi seperti mesin absensi, alat pengolah data, dan lain-lain, pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, televisi, dan lain sebagainya, yang merupakan kebutuhan operasional hari-hari di kantor, layanan keprotokolan berupa menginisiasi kegiatan forum komunikasi keprotokolan antar Kementerian dan Lembaga, kemudian layanan keprotokolan selama 12 bulan untuk Pimpinan, layanan umum berupa layanan rumah tangga, pemanfaatan PNBPN, BMN, layanan jasa keamanan kebersihan, kemudian pemindahan...pemindahtanganan BMN, penggunaan BMN, sarana dan prasarana berupa pemeliharaan, sarana prasarana yang ada di kementerian, kemudian layanan kesehatan berupa pengadaan obat, peralatan medis untuk poliklinik umum dan gigi yang ada di kementerian, baik kantor yang ada di Kalibata maupun di Abdul Muis, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Berikutnya adalah layanan penyelenggaraan kearsipan, itu juga kami bisa sesuai dengan target 100%, bisa dipenuhi, layanan perkantoran, pemeliharaan gedung dan kantor, kemudian pemberian asuransi gedung selama 12 bulan, pemeliharaan jaringan listrik, air, telekomunikasi, parkir, penerangan maupun CCTV yang kami lakukan sebagai pekerjaan rutin di biro umum dan layanan pengadaan, kemudian pemeliharaan peralatan dan mesin, *lift*, komputer, genset, dan lain sebagainya selama 12 bulan.

Kemudian, ada layanan prasarana internal tercapai 100% berupa renovasi atas berbagai kegiatan, yang paling utama adalah renovasi akibat kebakaran yang terjadi, sempat terjadi di lantai empat gedung utama kantor Kalibata, itu juga kami bisa selesaikan dan sekarang sudah beroperasi gedung atau lantai telah ditempati sebagaimana semula.

Kemudian, di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Pagu 2022, 51,5 miliar juga tercapai 100% dari target yang ditetapkan, antara lain capaiannya berupa, laporan keuangan semester dari Kementerian, laporan keuangan dan audit di tahun 2022, kemudian laporan keuangan audit tahun 2022.

Kemudian, layanan perbendaharaan dan tata usaha keuangan berupa laporan keuangan, laporan keuangan di Sekretariat Jenderal *and audited* maupun *auditing*, kemudian laporan tindak lanjut temuan pemeriksaan eksternal maupun temuan pemeriksaan internal tahun 2022.

Layanan berikut adalah penatalaksanaan anggaran, berupa laporan pelaksanaan anggaran Kementerian, laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau PIPK.

Berikutnya adalah layanan manajemen barang milik negara berupa laporan pemindatanganan mekanisme hibah dan bantuan pemerintah, laporan penghapusan barang milik negara, serta penetapan status penggunaan barang milik negara.

Berikutnya adalah layanan akuntansi dan pelaporan barang milik negara juga 100% kami bisa capai. Demikian untuk 2022, *alhamdulillah* sekali lagi kami laporkan target di Sekretariat Jenderal dengan realisasi 99,61% seluruh target bisa kami relasikan 100%.

Untuk 2023, rencana program dan anggaran, kami izin melaporkan, Sekretariat Jenderal tadi disampaikan oleh Pak Pimpinan, Pagu yang ditetapkan adalah Rp221.170.000.000,- terdiri dari rupiah murni Rp206.170.000.000,- belanja wajib 182,6 miliar dan belanja non wajib 23,5 miliar.

Kemudian, penjelasan yang minta oleh Pimpinan dan Anggota terkait dengan *automatic adjustment* tahun 2023, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02 Tahun 2022 untuk Sekretariat Jenderal yang di-*adjustment* adalah pertama, belanja pegawai 3,7 miliar, serta belanja barang dan belanja modal 15,9 miliar, total hampir Rp19 miliar.

Sehingga, dari Pagu awal Rp221.170.000.000 setelah *automatic adjustment* Pagu Efektifnya adalah Rp201.513.475.000,- dengan rincian sebagaimana yang ada di layar atau *monitor*.

Pagu ini sudah termasuk anggaran yang bersumber dari PHLN sebesar Rp15 miliar yang ada di Sekretariat Jenderal. Kami berencana sama dengan 2022, rencana penarikan dana atau RPD *insya* Allah sesuai dengan

kesepakatan atau target yang diberikan kurvanya tetap kurva S, tidak naik turun dan sesuai dengan kebutuhan yang kita susun sama-sama.

Output untuk 2023, mohon izin kami laporkan di Sekretariat Jenderal dari Biro Hukum Pagu RKA K/L-nya untuk 2023 5,9 miliar. *Output* prioritas Tahun 2023 di Biro Hukum adalah penyusunan *legal drafting* naskah perjanjian hukum, kemudian layanan penyuluhan dan informasi hukum, layanan tata usaha biro hukum, advokasi atau bantuan hukum, fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta penelaahan dan sosialisasi produk peraturan perundang-undangan.

Untuk Biro Humas, *output* prioritas 2023 dengan Pagu 12,3 miliar akan diupayakan untuk mencapai *output* prioritas antara lain, layanan pengaduan masyarakat, pengaduan termasuk tindak lanjutnya, layanan hubungan antar lembaga dalam maupun luar negeri, kemudian layanan tata usaha di biro humas, layanan informasi publik, kemudian pemberitaan dan publikasi baik media massa, media pembelajaran, maupun media sosial, layanan perpustakaan maupun pengelolaan data kehumasan Kementerian.

Output prioritas untuk Biro Perencanaan dan Kerjasama dengan Pagu 23,3 miliar, tahun 2023. Layanan yang akan menjadi prioritas antara lain, perencanaan manajemen kinerja, layanan perencanaan program dan anggaran, tata usaha biro, layanan evaluasi dan pelaporan kegiatan kementerian, layanan program kerja sama kementerian, pelaporan kinerja kementerian, serta dukungan bagi pinjaman luar terutama di program P3PD dengan World Bank ada 4 layanan yang membawahi 4 PIU atau *project implementing unit* di masing-masing unit kerja.

Untuk Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2023, Pagunya 22,2 miliar, *output* prioritasnya antara lain penempatan dan mutasi pegawai. Kemudian, layanan administrasi di kepegawaian, layanan administrasi pegawai PPNPN, kemudian layanan tata usaha biro, berikutnya adalah pengelolaan data dan informasi kepegawaian, selanjutnya pengembangan kompetensi pegawai, selanjutnya penataan organisasi dan tata laksana, serta penguatan reformasi birokrasi, serta penyusunan laporan kepegawaian dan organisasi.

Output prioritas berikutnya di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dengan Pagu 57,5 miliar, layanan yang akan menjadi prioritas adalah di bidang layanan gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah pegawai 378 orang, kemudian manajemen keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan barang milik negara dan layanan tata usaha biro.

Selanjutnya, di Biro Umum dan Layanan Pengadaan Pagu 2023; 99,6 miliar, layanan prioritasnya antara lain, layanan operasional dan pemeliharaan kantor selama 12 bulan baik kantor di Abdul Muis maupun kantor di Kalibata. Kemudian, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan ketatausahaan pimpinan. Kemudian, layanan perkantoran dan renovasi gedung dan bangunan, layanan rumah tangga selama 12 bulan, layanan keprotokolan 12 bulan, layanan klinik tingkat pratama, baik, klinik yang ada di kantor Abdul Muis

maupun kantor di Kalibata, kemudian pengelolaan sarana kerja kementerian, serta layanan di bidang kearsipan.

Demikian, Pimpinan, dan Anggota yang kami hormati, evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian, khususnya di Sekretariat Jenderal tahun 2022, serta rencana program dan anggaran ataupun *output* prioritas di Sekretariat Jenderal Tahun 2023, lebih kurang kami mohon maaf dan mohon arahan serta petunjuk lebih lanjut. Mohon izin, kami lanjutkan di unit kerja yang lain.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi.

KETUA RAPAT:

Pak Irjen, sebelum Bapak membacakan presentasinya saya kira bahan sudah kita dapat, Pak, saya...saya harapkan untuk yang Evaluasi Tahun 2022 yang umum saja, Pak, dibacakan, kita fokus *output* untuk 2023. Silakan, Pak.

Plt. IRJEN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (Ir. EKO SRI HARYANTO, M.M.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Bapak Pimpinan,
Yang saya hormati Bapak...Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI baik yang hadir secara *offline* maupun *online*.**

Perkenan kami sampaikan beberapa hal yang terkait dari Inspektorat Jenderal. Evaluasi, langsung saja evaluasi tahun 2022, untuk capaian terutama di dalam penyerapan anggaran. Jadi, ada lima inspektorat, kita, dan satu Sekretariat, capaian kita itu 97 eh 98%...97,98% dari Pagu Anggaran 40,791 miliar.

Yang berikutnya, kami akan sampaikan capaian *output* untuk prioritas tahun 2022. Yang pertama adalah tentang audit kinerja. Jadi, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, lalu juga *review* laporan keuangan dan untuk dan PIPK, ini adalah pengendalian intern atas laporan keuangan kita 100%. Lalu berikutnya juga *review* tentang RKA K/L dan RK, RKPMN kita juga 100% dari 26 laporan, *review* revisi anggaran karena ini adalah sering revisi anggaran di Kementerian. Ini, 8 laporan tapi kita realisasi 39 laporan dari setiap antar revisi kita harus laporan.

Yang berikutnya juga *review* laporan kinerja, itu tercapai 8 laporan 100%. Audit untuk investigasi kita juga dua laporan dan tercapai 100%,

pemantauan dana desa dan DAK, ini targetnya 4 laporan triwulanan tercapai kita 100%. Tela'ah pengaduan dana desa di 4 laporan triwulanan realisasi juga laporan tercapai.

Yang berikutnya juga *review* tentang PBG, jadi pengadaan barang jasa di 9 laporan realisasi kita 24 laporan. Jadi, kita tercapai dan melebihi 100%.

Yang berikutnya juga *monev* SAKIP, SPIP, PMPRB dan ZI. Ini 37 laporan dari 36 laporan sudah tercapai, menyisakan sedikit satu laporan itu ya, jadi 97%, mohon maaf. Lalu mengenai audit kita 96 laporan kita tercapai karena masing-masing 8 UK, itu adalah per bulan, jadi 96 laporan.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Selanjutnya, kami akan sampaikan untuk Program Kerja Tahun 2023. Jadi, program kerja untuk tahun 2023 langsung kepada Pagu DIPA saja, ini adalah Pagu DIPA kita adalah 94, 49 miliar 674 juta. Nah, sesuai dengan kebijakan pemerintah kita ada blokir *automatic adjustment* itu 8,695 miliar. Jadi, ini juga kalau kita persentase 17,5% dari total anggaran kita, sehingga kita dalam waktu yang sekarang, itu mungkin kita bisa mengeksekusi Pagu di 40,9 miliar, kecuali kalau blokir nanti lambat laun atau kebijakan pemerintah dibuka sehingga kita bisa kerjakan semua.

Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan prosentase untuk kegiatan belanja barang 50,45% dan berikutnya juga gaji pegawai 46,74% dan sisanya adalah belanja modal yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan alat-alat dan sebagainya itu 28,1%. Sehingga, dengan harapan ini kita bisa...akan bisa mencapai target-target yang kita tentukan.

Selanjutnya, *output* prioritas untuk Inspektorat I sampai V. Kami ada lima sebenarnya, tapi Inspektorat I sampai IV itu adalah layanan, sifatnya, jadi *output* yang akan kita capai adalah audit kinerja, itu di 8 laporan, karena 8 UK, UK 1 maksud saya, lalu audit dengan tujuan tertentu di 16 laporan. Jadi, Kementerian, ini per Kementerian dan 81 UK I.

Review laporan keuangan dan BPK ini 36 laporan, ini sebenarnya sesuai dengan tahun 2022. Lalu *review* RKA K/L dan RKBMN, ini targetnya 24 laporan. *Review* revisi anggaran ini targetnya 24 laporan, tahun 2022 kita 8 laporan tapi kita tingkatkan menjadi 24 laporan.

Yang berikutnya juga *review* laporan kinerja targetnya 6 laporan, ini per 8 UK 1. Berikutnya *review* untuk PBJ (Pengadaan Barang Jasa), targetnya 24 laporan. Tahun 2022, kita 9 laporan sehingga kita tingkatkan menjadi 24 laporan. Berikutnya, untuk *monitoring* dan evaluasi SAKIP, SPIP, PMPRB, dan ZI, 37 laporan dan menilai audit itu 96 laporan. Ini per bulan kita harus terbitkan sesuai dengan UK 1.

Selanjutnya, kami akan laporkan khusus untuk *output* prioritas Inspektorat V, ini adalah audit investigasi, enam laporan, ini dari delapan UK 1, lalu pemantauan dana desa dan DAK, di 36 laporan, tela'ah pengaduan dana

desa targetnya adalah 4 laporan. Berikutnya adalah evaluasi LHKPM dan SPI, ini survei untuk penilaian integritas, di dua laporan. Lalu penanganan gratifikasi...gratifikasi *siber* pungli benturan kepentingan itu targetnya kita enam laporan. Tata kelola untuk WBS, targetnya dua laporan yang akan kita jalankan tahun 2023.

Selanjutnya Bapak-Ibu, kami akan sampaikan strategi pengawasan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan bagaimana kita mengawasi internal untuk lebih intensif. Strategi adalah kita melakukan Jakwas atau ini kebijakan pengawasan kita yang *udah* ditetapkan oleh keputusan Inspektorat Jenderal tahun 2021 dan surat edaran Irjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Arah Kebijakan Pengawasan.

Yang berikutnya, di dalam pengawasan juga harus menyusun adalah program kerja pengawasan tahunan atau PKPT. Jadi, sudah tertata sesuai dengan target-target yang akan dicapai.

Yang berikutnya adalah pengawasan itu bisa menghasilkan *policy brief*, yaitu perubahan paradigma pengawasan APIP dengan melakukan *audit* kinerja untuk menghasilkan *policy brief* bagi UK 1.

Yang berikutnya juga, layanan konsultasi ini penting sekali, karena kita berharap bahwa inspektorat jenderal, itu bisa memberikan fasilitasi yang maksimal terhadap standarisasi layanan untuk bagaimana kita memperkecil di dalam permasalahan-permasalahan sekaligus untuk konsultasi dan mengintegrasikan program-program yang akan dicapai.

Di sisi yang lain, sebenarnya kita juga harus meningkatkan kapasitas SDM. Jadi, diklat pembentukan untuk jabatan fungsional *auditor* dan JF lainnya, serta diklat teknis substantif dan sertifikasi profesi. Ini semata-mata sebenarnya kita ingin meningkatkan kapasitas *auditor* dan tahun 2022 kita sudah bisa mengikutkan kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan sertifikasi profesi di 110 ASN, Tahun 2021-61 ASN, jadi peningkatannya cukup tajam.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Di dalam pencegahan korupsi, kita pengendalian gratifikasi itu menjadi kunci utama di dalam kegiatan kita, lalu Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, yang berikutnya adalah perjanjian kerja sama pengaduan TPK yang terintegrasi dengan KPK, WPS, ini sudah kita lakukan pembicaraan langsung dengan KPK dan kita akan mengintegrasikan aplikasi yang minggu yang kemarin sudah kita jalankan, sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan.

Yang berikutnya adalah rencana aksi *siber* pungli, yang berikutnya survei penilaian integritas atau SPI, ini dari KPK, lalu manajemen risiko untuk di semua UK.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Di dalam kegiatan survei penilaian integritas, selanjutnya, kita mengalami peningkatan dari poin, berikutnya. Ya, terima kasih. Jadi, poin 65,67 dan kita tahun 2022 kita peningkatan menjadi 74,2 ini adalah bagian dari penilaian-penilaian SPI, sehingga kita berharap bahwa, empat dimensi dari SPI itu bisa kita peroleh dengan baik. Jadi, budaya anti korupsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan tentang anggaran, dan yang berikutnya bagaimana kita mengurangi atau sistem anti korupsi. Ini kita jalankan tadi sudah dilaporkan juga oleh Pak Sekjen.

Yang berikutnya, pengawasan untuk penanganan pengaduan dana desa. Berikutnya, terima kasih. Jadi, pada tahun 2019 sampai tahun 2022, kita memang himpun, tahun 2019 hanya 27, peningkatan tahun 2020, 21, dan 22 ini pengaduannya sama kebetulan. Tetapi, tahun 2022 kita tindak lanjut di dalam itu 85, jadi 38 tidak kita tindaklanjuti.

Jadi, penyebab yang tidak...tidak bisa ditindaklanjuti itu karena memang identitas pelapornya atau *contact person*-nya tidak jelas, sehingga itu kita harus *tau* persis, harus ada tanggung jawab dari pelapor. Lalu, pengaduan yang disampaikan tidak dapat dijabarkan adanya indikasi penyelewengan karena pengaduan. Jadi, setiap pengaduan kita lihat, kita *review*. Lalu kelengkapan pengaduan tidak dilengkapi bukti-bukti yang jelas tentang penyimpangan penggunaan dana desa, sehingga pada tahun 2022. Ini sudah ada yang tinggal di oleh daerah 11 itu, ya. Jadi, kita terus memantau dari 85 pengaduan yang memang itu adalah tugas dari APIP Daerah.

Demikian, Bapak-Ibu yang kami hormati,

Terima kasih dan kami mohon dapat masukan saran untuk bagaimana peningkatan dari Inspektorat Jenderal. Demikian, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan, yang singkat-singkat *aja*, Bu, ya.

KEPALA BPSDM-PMDDTT KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (Prof. Dr. LUTHFIYAH NURLAELA, M.Pd.):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,

Salam kebajikan,

Mohon izin, Bapak Pimpinan Rapat, kami dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mohon izin menyampaikan laporan untuk evaluasi kinerja di 2022 dan juga program di Tahun Anggaran 2023.

Mohon untuk langsung ke indikator capaian kinerja utama, ke *slide* nomor 6. Iya, terima kasih.

Sasaran untuk BPSDM ada 5, yang pertama meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, kemudian meningkatnya SDM Aparatur pejabat fungsional, dan juga meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, serta terwujudnya BPSDM yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi dengan beberapa indikator kinerja utama yang ada di kolom yang kedua, di mana di dalam indikator kinerja setiap sasaran sudah kami jabarkan.

Kemudian, untuk hasil evaluasi di Tahun Anggaran 2022, *next*, langsung di rincian Pagu, terima kasih.

Rincian Pagu untuk Tahun Anggaran 2022, di BPSDM ada 14 Satker, yaitu sekretariat dan empat pusat, kemudian ada sembilan balai, dua balai besar dan dua balai-balai. Kemudian, untuk tahun 2022 total Pagu yaitu 1,7 triliun yang ada di satu sekretariat dan empat pusat, serta di dua balai besar dan di tujuh balai, *next*.

Kemudian, untuk capaian pelaksanaan anggaran, langsung di capaian pelaksanaan anggaran, terima kasih. Ada, di sana di Kurva S, di penyerapan anggaran 2022, di sana ada sedikit bukan penurunan, tetapi sedikit kenaikan pada Oktober dan November, karena pada saat itu ada penambahan Pagu PHLN atau *loan* yaitu 44 miliar dan itu untuk peningkatan kapasitas TPP. Realisasi sampai dengan 5 Januari 2023 sebesar 99,0,5% dengan deviasi sebesar 0,9%.

Kemudian, untuk capaian nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) mencapai skor 89,75 yang artinya adalah baik yang meliputi dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan.

Selanjutnya, pada capaian indikator kinerja utama Tahun Anggaran 2022, *next* capaian indikator. Di setiap capaian IKU semua tercapai, yaitu di tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan, penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian, pada tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap hasil layanan, selanjutnya juga pada presentase tenaga pendamping profesional yang berkinerja baik, juga pada presentasi kader pemberdayaan masyarakat pedesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat desa.

Kemudian, ada sedikit belum tercapai targetnya yaitu pada persentase pejabat fungsional tertentu yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan

regulasi yang ditetapkan, untuk yang lainnya termasuk nilai SAKIP, kemudian juga presentasi nilai hasil penilaian mandiri, pelaksanaan reformasi birokrasi juga mencapai target atau sama dengan target atau melebihi target dan sedikit masih di bawah target adalah persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP.

Kemudian, untuk evaluasi capaian kinerja prioritas nasional tahun 2022 yaitu pada kegiatan pendampingan desa targetnya adalah 35 ribu orang jumlah pendamping desa yang terkontrak, kemudian realisasinya adalah 34.753 orang. Sedangkan, pada penguatan pemerintah dan pembangunan desa dengan indikator *output* jumlah orang yang mengakses *platform* akademi desa yaitu 30 ribu orang, ini realisasinya jauh di atas target yaitu 82.092 orang sedangkan jumlah TPP yang ditingkatkan kapasitasnya, targetnya adalah 15 ribu orang dan realisasinya 10.990 orang.

Selanjutnya, untuk evaluasi capaian kinerja yang non prioritas nasional yaitu meliputi kegiatan sertifikasi, kemudian pelatihan masyarakat, bahan kebijakan dan regulasi pelatihan, uji kompetensi penggerak swadaya masyarakat atau PSM, serta peningkatan kapasitas PSM.

Untuk sertifikasi targetnya adalah 5.120 orang, yaitu jumlah TPP yang tersertifikasi baru mencapai 3.916 orang, kemudian dengan 3.842 orang ini menggunakan APBN Kementerian Desa, sedangkan 74 orang APBD dari Kabupaten Kukar, Kutai Kartanegara.

Kemudian, untuk pelatihan masyarakat, sedikit tidak mencapai target yaitu pada angka 4.198 orang, yaitu pelatihan BUMDes, desa wisata, Catrans, kewirausahaan, kemaritiman. Kemudian untuk jumlah dokumen, empat dokumen sebagai target tapi realisasinya adalah sembilan dokumen.

Selanjutnya, untuk target persentase fungsional tertentu untuk uji kompetensi mencapai target 100% dan jumlah PSM yang ditingkatkan belum mencapai target, masih 424 orang dari 1.000 orang.

Selanjutnya, mohon izin untuk menyampaikan rencana kerja Tahun Anggaran 2023. Pagu Anggaran, per jenis belanja untuk total Pagu Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.787.963.120.000,-. Kemudian, terdiri dari belanja pegawai sekitar 3,6% yaitu 64,1 M, kemudian belanja operasional 33,4 M dan juga belanja non operasional yang ini termasuk di dalamnya adalah honor untuk pendamping yaitu 1,6 triliun atau 94,3% dan belanja modal sebesar 3 M, 3 M lebih atau 0,2%, dan ada blokir *automatic adjustment* yang terdiri...yang 28 sebesar 28 M di mana AA, untuk yang ini terdiri dari blokir di belanja pegawai sebesar koma tiga... 3,9 M dan AA untuk belanja barang dan modal sebesar 24 M.

Untuk rincian dari Pagu Anggaran, kami bisa sampaikan bahwa, anggaran 1,787 atau 1,7 triliun ada di sekretariat, sebesar 54 M, kemudian 54,4 M, kemudian di pusat PPMD yang paling banyak ini adalah 1,6 triliun, Puslat...Puslat SDM 23,9 M dan Puslat ASN, enam koma, 6.078.480.000 serta Puslat Jabatan Fungsional 43...4,3 M.

Ada anggaran...terdiri dari anggaran rutin dan dukungan manajemen, kemudian juga ada rupiah murni dan juga *loan* rupiah murni dan ada *loan* di PPMD, serta SDM sebesar 52,5 M yang di PPMD dan 19,9 M yang di pusat SDM, sehingga jumlah untuk *loan*-nya adalah 72,500...72,5 M.

Selanjutnya, untuk blokir AA sebanyak 28,1 M dengan jabaran seperti yang kami tampilkan pada tabel tersebut.

Selanjutnya, untuk rencana dan realisasi penarikan anggaran 2023 seperti pada tabel berikut dengan total 1,7 triliun dengan alokasi per jenis belanja, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal di mana alokasi berdasarkan sumber dana RM, sebanyak 1,7 triliun dan *loan* sebanyak 72,5 M.

Kemudian, untuk rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa, Tahun Anggaran 2023, yang pertama adalah untuk peningkatan kapasitas TPP, peningkatan kapasitas pendamping desa sebanyak 15.800 orang, kemudian peningkatan kapasitas tenaga pelatih melalui TOT dan MOT yang ini dipenuhi dari anggaran *loan*.

Kemudian, untuk pendamping desa pengelolaan 35 ribu orang pendamping desa untuk pembayaran honor dan juga untuk pelaksanaan sertifikasi bagi PLD.

Selanjutnya, untuk dokumen kebijakan dan regulasi ada dua dokumen dan kemudian juga untuk pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program rekognisi pembelajaran lampau desa.

Selanjutnya, untuk rencana kegiatan di Puslat SDM, yaitu untuk pelatihan masyarakat sebanyak 7.500 orang yang ini dilaksanakan di Balai-balai, yaitu terdiri dari desa wisata, BUMDes, kemudian calon transmigrasi, juga pelatihan kemaritiman, kemudian ada pelatihan ekonomi kreatif dan pelatihan perencanaan pembangunan, serta pelatihan Prokades dan pelaksanaan KPM, dan pelatihan KPMK yang sebagian ada di dalam...masih ada pada skema AA (*Automatic Adjustment*). Kemudian, juga ada dokumen kebijakan evaluasi dan Bimtek, serta 32 ribu orang akses *platform* akademi desa.

Selanjutnya, untuk rencana kegiatan pembinaan jabatan fungsional targetnya adalah dihasilkannya dua dokumen kebijakan yaitu *roadmap* PSM dan *review* Permenpan-RB 28 Tahun 2018. Kemudian, juga 200 orang ditingkatkan kapasitasnya yang ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan jabatan fungsional PSM, serta peningkatan kapasitas penghitungan formasi dan tim penilai JFPSM. Kemudian, juga 20 orang PSM tersertifikasi melalui uji kompetensi dan juga kegiatan penyusunan SBK sertifikasi dan 300 orang PSM ditetapkan angka kreditnya yang ini dilakukan fasilitasi untuk penilaian angka kredit dan juga evaluasi pembinaan PSM.

Berikutnya adalah rencana kegiatan pelatihan ASN Tahun Anggaran 2023 akan dihasilkan 7 dokumen kebijakan dan regulasi. Kemudian, juga sebanyak 500 orang SDM aparatur yang mengikuti pelatihan struktural atau

fungsional dan teknis beberapa di antaranya adalah pelatihan kepemimpinan nasional Tingkat II yaitu 6 orang, dan juga pengembangan kelembagaan tenaga pelatih dan kerja sama pelatihan dan untuk anggarannya adalah 6 M, 6.078.480.000

Kemudian, untuk rencana kegiatan dukungan manajemen di tahun 2023 terdiri dari layanan perkantoran, baik untuk belanja pegawai maupun untuk operasional dan pemeliharaan di pusat dan balai-balai.

Kemudian, juga untuk layanan sarana dan prasarana internal termasuk di dalamnya adalah unit mobil Eselon I, yang ini masuk ke dalam skema AA, kemudian peralatan fasilitas kantor, renovasi, dan pengadaan alat, serta layanan manajemen SDM, layanan perencanaan, dan penganggaran, serta layanan manajemen keuangan.

Berikutnya adalah rencana pelatihan SDM tahun 2023, di balai besar Jakarta 900 orang, kemudian di balai besar Yogyakarta 1.020 orang, kemudian di balai Pekanbaru 750, di Bengkulu 750, Banjarmasin 870, Denpasar 780, Makassar 960, dan Ambon 870, serta Jayapura 600 orang.

Untuk lokus pelatihan sudah kami jabarkan dan kami tidak perlu menyampaikan semuanya karena ini sangat banyak.

Terima kasih, mohon arahan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, selanjutnya silakan, Pak Kepala Badan.

**KEPALA BPID-DDTT KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI
(Dr. IVANOVICH AGUSTA, S.P., M.Si):**

Terima kasih.

**Yang terhormat Bapak Wakil Komisi V,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi V,**

Kami sampaikan capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 untuk Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ada di *slide* kelima. Bahwa, di tahun 2022 sesuai data onspan sampai tanggal 31 Januari 2023, realisasi akhir adalah Rp101.649.940.365,- atau 95,14%, masih terdapat *gap* deviasi sebesar 1,56% antara target serapan sebesar 96,7% dengan realisasi sebesar 95,14%. Ini terutama berkaitan dengan sisa kontrak untuk *loan* bank dunia yang baru terlaksana pada akhir tahun. Kemudian, kami lanjutkan hasil dari Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di *slide* ketujuh.

Dengan anggaran 59,614 miliar yang dihasilkan berupa layanan perencanaan dan penganggaran empat dokumen, layanan pemantauan dan evaluasi empat dokumen, pembinaan kepegawaian 336 orang, layanan organisasi dan tata kelola internal empat dokumen, layanan hukum empat dokumen, layanan umum selama 12 bulan, kemudian layanan manajemen keuangan, layanan *bandwidth* internet, operasional dan pemeliharaan kantor, penyelenggaraan kearsipan pengembangan pegawai gaji dan tunjangan PNS.

Kemudian, untuk Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi anggaran 3,28 miliar digunakan untuk pengelolaan data dan informasi sesuai arahan Pimpinan pada awal RDP ini, berupa pemetaan batas RT, berbasis partisipatoris rencana aksi satu data bidang desa, kemudian meta data, standar data berkaitan dengan satu data tadi, kemudian pelatihan data dan informasi kepada balai. Pelatihan itu mencakup data SDGs desa, data indeks desa membangun, data APBDes, kemudian profil dari badan usaha milik desa, penggunaan dana desa, ketransmigrasian, berbagai indeks komposit berkaitan dengan kawasan pedesaan dan transmigrasi, serta daerah tertinggal. Data berkaitan untuk *stunting*, difabel, kemudian penyusunan keputusan menteri untuk walidata, produsen data dan rencana aksi satu data bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kemudian pada Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi anggaran 3,2 miliar digunakan untuk kebijakan berkaitan dengan rekomendasi untuk ketahanan pangan melalui dana desa, peran masyarakat untuk mendukung revitalisasi kawasan transmigrasi, penguatan kelembagaan badan usaha milik desa, strategi pengembangan wilayah untuk integrasi desa/kota, kemudian model *village governance* untuk pembangunan ekonomi lokal, model kebijakan pembangunan desa berbasis SDGs desa, kemudian pengembangan ekonomi dan investasi di daerah tertinggal, kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi di kawasan pedesaan dan transmigrasi. Kemudian, berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan investasi di daerah tertinggal, kemudian rekomendasi ekonomi dan investasi pedesaan, serta Keterpaduan Program Ekonomi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pada Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan realisasi anggaran 33 miliar berupa pengembangan desa digital melalui program *loan smart village*. Kemudian, pengembangan teknologi tepat guna, kemudian pengembangan teknologi tinggi untuk desa, pengembangan teknologi digital untuk desa, kemudian dokumen kesepakatan kerja sama untuk Model Peningkatan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta pengembangan kreativitas dan inovasi produk desa.

Untuk pusat penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Anggaran 2,5 miliar digunakan untuk penyusunan peta jalan pembangunan kawasan pedesaan 2020-2024, kemudian untuk kawasan transmigrasi *background study* untuk Rencana Induk Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2025-2045. Kemudian peta jalan untuk pembangunan transmigrasi 2025-2029, peta jalan untuk pembangunan pedesaan 2025-2029, *background study* untuk peta jalan

daerah tertinggal 2025-2029, serta penyusunan rencana tata ruang pembangunan desa atau RTR desa.

Adapun untuk Tahun Anggaran 2023 di halaman atau *slide* 16 secara keseluruhan sesuai yang disampaikan Bapak Pimpinan tadi, ada Rp131.339.762.000,- anggaran yang masuk ke dalam Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun *automatic adjustment* untuk BPI itu sebesar Rp16.002.057.000,-

Kemudian, rencana kerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi, ini mencakup layanan perencanaan dan penganggaran empat dokumen berupa program kerja, revisi DIPA, rencana kerja, dan penyusunan RKA K/L untuk 2024.

Kemudian layanan pemantauan dan evaluasi empat dokumen mencakup e-Monev, Smart, e-SAKIP dan SPIP. Pembinaan kepegawaian akan dilaksanakan kepada 336 pegawai, kemudian layanan organisasi dan tata kelola internal empat dokumen yaitu pengembangan kompetensi SDM, standar kompetensi jabatan, rencana pengembangan PNS, dan analisis kebutuhan pegawai.

Layanan hukum mencakup empat dokumen, yaitu advokasi hukum, bengkel...hak atas kekayaan intelektual, pelaksanaan sistem manajemen mutu, ISO-9001.2015 dan penyusunan perjanjian kerja bersama.

Untuk layanan umum dilaksanakan 12 bulan, layanan manajemen keuangan mencakup satu layanan, *bandwidth* internet untuk 12 bulan, operasional dan pemeliharaan kantor 12 bulan, layanan penyelenggaraan kearsipan, kemudian pengembangan kompetensi pegawai ini 120 orang, kemudian gaji dan tunjangan PNS untuk 183 orang.

Pada pusat Data DAN Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan dilaksanakan pengembangan sistem informasi untuk 12 aplikasi berupa *daily report* pendamping desa, BUMDes, Monev dana desa, untuk izin pembangunan di kawasan transmigrasi, dokumentasi hukum, sistem informasi desa, untuk aplikasi sistem informasi di internal pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, informasi untuk manajemen usulan hibah dan barang milik negara, pembuatan peta terpadu, pengembangan peta terpadu, kawasan transmigrasi, serta pengelolaan data desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Untuk dukungan layanan jaringan komunikasi data mencakup langganan *bandwidth* untuk internet, baik yang untuk *main* atau pusatnya dan untuk *backup*. Layanan sapa desa, mencakup pemeliharaan *call centre*, layanan telepon dan untuk koordinator dan untuk operator sapa desa.

Untuk pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi mencakup pemeliharaan *data center* dan genset, server, untuk UPS dan untuk pemeliharaan *processor air conditioner*. Pengembangan kerja sama data dan informasi mencakup pemanfaatan hasil olahan data pada SDGs *center* dengan

perguruan tinggi maupun dengan pemerintah daerah. Kemudian, pengelolaan teknologi informasi baik itu untuk pemeliharaan jaringan aplikasi *database* dan *website*.

Secara rinci, data di informasi yang tadi di mendapatkan arahan dari Pimpinan mencakup data SDGs desa indeks desa membangun badan usaha milik desa, penggunaan dana desa, realisasi, dan penggunaan dana desa untuk difabilitas, data BUMDesa dan APBDes.

Kemudian, pada Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencakup rencana rekomendasi kebijakan bidang desa dan kawasan pedesaan, kebijakan daerah tertinggal, kebijakan untuk daerah tertentu, transmigrasi dan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Pada pusat pengembangan daya saing akan dikembangkan model kreativitas dan inovasi, model pengembangan teknologi tepat guna, model pengembangan teknologi tinggi pelaksanaan gelar teknologi tepat guna nusantara, pengembangan model teknologi digital, pengembangan ruang komunikasi digital, jejaring desa cerdas, pengembangan kapasitas digital di desa, serta pengembangan kapasitas untuk pemerintah desa.

Pada pusat penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa akan dikerjakan dokumen rencana Induk Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian *roadmap* atau peta jalan desa dan pedesaan semuanya untuk RPJM ke depan 2025-2029, juga berkaitan dengan *roadmap* badan usaha milik desa, *roadmap* pendampingan desa, kemudian revisi PermenDesa 5/2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan, terutama berkaitan dengan cara penilaian, penyusunan lokus dan fokus keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, *review* rencana kawasan transmigrasi, advokasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan desa, *roadmap* percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta *roadmap* untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Di bagian akhir, kami sampaikan secara khusus kegiatan *loan* yaitu jejaring desa cerdas, duta digital, peningkatan kapasitas, dukungan manajemen untuk pelaksanaan desa cerdas, serta pemantauan evaluasi dan peningkatan pengembangan desa cerdas.

Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, mohon arahan berikutnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Sekjen, Pak Irjen, Bapak-Ibu Kepala Badan atas paparan yang telah disampaikan kepada kami.

Saat ini untuk sementara ada enam Anggota Komisi V yang akan bertanya dan mungkin nanti akan nambah nih Pak Sekjen, yang pertama kami persilakan Ibu Sri Rahayu. Silakan, Bu.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat, Pak Pimpinan dan Anggota Komisi V,
Pak Sekjen,
Pak Irjen,
Pak, Ibu Dirjen yang saya hormati, dan
Pak Dirjen,**

Saya langsung saja, yang pertama adalah untuk semuanya mungkin. Tadi saya lihat di terakhir dari Pak, *oh* badan ya, Pak Badan Pengembangan Informasi Desa menyampaikan tentang *roadmap*, tapi untuk semuanya saya tidak *tau roadmap* yang disusun oleh masing-masing.

Maksud saya ketika perjalanan waktu tentu *roadmap*-nya biasanya dimulai dari masa jabatan Presiden, Wakil Presiden biasanya begitu. Kenapa ini saya tanyakan, supaya kita *tau* Pak-Bu. Mulai dari tahun mungkin tahun 2020, anggap *aja* 2020 sampai 2025. Dari Pak Sekjen dan yang lain-lain itu mestinya harus ditunjukkan kepada kita apalagi ini kan hasil akhir yang disampaikan oleh kita...kepada kita tahun 2020 *roadmap*-nya seperti ini, yang sudah dicapai tahun 2020, 21, 22 seperti ini. Sehingga tahun 2003 dan 2004 yang akan berpengaruh kepada program-program yang Bapak-Ibu rencanakan di tahun 2023 itu akan terketahui. Kalau saya melihat dari semua ini, itu hanya sesuatu yang biasa terjadi dari tahun ke tahun. Kan, mungkin ada program yang hanya, yang bisa selesai satu tahun, ada yang dua tahun, tiga tahun, ada bahkan mungkin lebih dari lima tahun, dituliskan saja di sini supaya kita *tau* secara persis sejauh mana capaiannya, sehingga tidak hanya.

Saya tadi bolak-balik lihat misalnya seperti dari sumber daya manusianya, ya, tahun 2002 yang dicapai sekian, tahun 2023 rencananya sekian, ini sudah selesai apa belum tahun 2023? Lalu bagaimana saya melihat datanya kalau ini adalah sudah tercapai. Pendamping misalnya yang di situ disampaikan ada sekitar 34 ribu sekian yang realisasinya, tahun 2023 ini akan ada pergantian berapa orang itu harus jelas juga, sehingga kan pasti ada anggaran untuk itu. Sehingga pada tahun 2023 untuk mencapai ini harus direkrut sekian orang, itu harus jelas sehingga kita *nggak* tanya.

Sebenarnya saya ingin jawaban secara langsung dari Bapak-Ibu sekalian, tapi karena ini secara tertulis menurut saya hal-hal yang poin-poin penting saya perlu mendapatkan jawaban secara langsung.

Anggap misalnya satu contoh dari Pak Sekjen tadi. Contohnya adalah capaian atau *output* layanan hukum. Di situ banyak misalnya advokasi hukum litigasi terhadap tujuh kasus, kasus apa *nih*.

Kemudian, membuat peraturan pemerintah, membuat peraturan Menteri, membuat keputusan Menteri. Kita ini *nggak* pernah *tau loh kayak* kita ini *kayak* orang-orang yang tidak *tau* sana-sini *loh* tentang ini. Artinya tiba-tiba muncul Peraturan Menteri tiba-tiba ada kerja sama yang kita sama sekali *nggak tau* karena *nggak* pernah mendapatkan informasi tentang hal tersebut, sehingga kita juga harus *tau* perjanjian kerjasamanya itu ini-ini-ini loh apa yang mau kita kerjakan, demikian juga peraturannya *tuh* peraturan ini-ini *loh*, dan sampai hari ini kita semua di Komisi V ini tidak pernah *motong* dari apa yang Bapak-Ibu sampaikan, kita hanya iya-ya saja tetapi tolong jangan ada dusta di antara kita.

Artinya, apa yang diprogramkan itulah yang memang harus dikerjakan dan itulah anggarannya. Saya juga...juga merasa misalnya penyusunan peraturan perundangan telah tersusun 404 peraturan perundangan, coba bisa bayangkan 404 peraturan perundangan, itu dalam satu tahun *loh*. Belum nanti tahun 2023 berapa ribu nanti peraturan perundangan yang harus dibuat. Siapa yang akan *tau* siapa yang hafal dengan hal tersebut dan kita *nggak* pernah *tau* ini peraturan apa tiba-tiba ada isu, ada kerja sama antara mudah-mudahan tidak benar ya isunya ini, kerja sama tentang program dari Kementerian PUPR dengan Kemendes dan seterusnya untuk pembangunan untuk program-program harus dikerjasamakan misalnya.

Hal-hal semacam itu tentu membuat kami juga merasa bahwa, kita ini *kayak kok nggk* banyak ngerti ya tentang hal tersebut. *Nah*, oleh karena itu, *roadmap* dari semuanya itu harus ada dan harus jelas. Bapak membuat peraturan perundang-undangan ini untuk apa, ini kan juga harus jelas juga meskipun itu adalah amanah dari Undang-Undang meskipun itu. Jangan sampai kita ini kayak orang yang...apa ya, *nggak tau* tentang hal-hal yang Bapak-Ibu kerjakan begitu.

Kemudian, ada banyak hal yang sudah saya tandai. Ini *legal drafting* naskah perjanjian hukum, *nah* ini kami juga harus *tau dong* perjanjian hukum apa. Tadi juga ada tentang terkait dengan perjanjian dengan hubungan antara lembaga dalam dan luar negeri. *Nah*, ini perjanjian apa yang akan dilakukan oleh Kemendes ini, kaitannya dengan perjanjian dengan luar negeri, ini tolong kami juga diberi info tentang hal tersebut supaya kita tidak banyak bertanya tetapi memang *tau* apa yang menjadi arah dari kebijakan semua yang ada di bawah apa di Dirjen, badan maupun Pak Sekjen, Pak Irjen.

Kemudian Pak Irjen, saya ingin *tau* bahwa dari...dari apa yang Bapak sampaikan saya juga yakin itu tidak ada *roadmap*-nya sebenarnya kita di tahun sebelumnya. Apa yang mau digapai di tahun 2023 ini apa, sebenarnya, artinya poinnya apa.

Bapak tadi sampaikan bahwa, luar biasa saya apresiasi dari 65 koma sekian persen menjadi 74 koma sekian persen, untuk kaitannya dengan KPK.

Tolong saya diberi penjelasan, kenapa dari-dari KPK itu 65 sehingga melonjak menjadi apa sebenarnya sebelumnya sehingga mencapai posisi yang paling rendah di antara lembaga-lembaga yang lain dan sekarang lonjakannya begitu luar biasa, apa yang membuat itu.

Kemudian, kaitannya dengan dana desa. Sampai sejauh ini dana desa itu seperti apa sebenarnya, karena banyak isu bahwa banyak kepala desa yang menjadi korban hukum dengan hal ini. Lalu, apa yang Bapak, lakukan terkait dengan hal tersebut. Bagaimana komunikasinya, Bapak dengan pendamping desa yang ini juga tugasnya antara lain juga selain merencanakan juga membantu untuk memberikan arahan-arahan pengawasan terhadap hal tersebut.

Nah, kira-kira dari sekian desa yang ada 84 ribu desa, itu menurut Bapak, kira-kira berapa persen yang mengalami hal tersebut dan kira-kira capaian di tahun 2023-2024 ini akan menjadi seperti apa desa-desa tersebut, kaitannya dengan hal tersebut. Karena saya yakin dengan adanya pendamping desa ini tidak hanya sekedar merekrut orang, tetapi tugasnya antara lain adalah memberikan bantuan kepada kepala desa untuk menjalankan program maupun pelaksanaannya, sehingga ini perlu menjadi perhatian jangan hanya rekrut orang.

Dan, ini sekaligus mumpung ingat kepada Ibu yang menangani hal tersebut, banyak WA-WA yang beredar. Sebelum itu, saya ingin sampaikan, tolong tenaga pendamping ataupun koordinator terutama yang berada di wilayah yang bersangkutan jangan dipindahkan ke daerah lain, ini banyak masukan kepada kami. Apapun alasannya karena kita menggunakan orang-orang pada potensi lokal yang ada. Jangan orang Gresik dipindahkan ke Sidoarjo atau sebaliknya orang Sidoarjo pindahkan ke Gresik, tolong ini menjadi perhatian. Karena dulu sempat ada orang Trenggalek kemudian ada menjadi petugas koordinator pendamping di wilayah Ponorogo kalau *nggak* salah itu juga dipersoalkan, tapi sekarang justru dipindahkan dari wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi dipindahkan ke tempatnya. Ini tolong menjadi perhatian dan minta, saya, dengan hormat untuk dikembalikan di tempatnya masing-masing.

Karena ini kita lihat potensi wilayah masing-masing begitu dan mereka saya yakin dengan menjadi koordinator di wilayah tersebut itu mereka akan justru lebih mengenal wilayah yang bersangkutan. Di satu sisi juga, biaya hidup mereka juga akan semakin ringan dengan hal tersebut, kalau dipindah di tempat desa artinya dia harus mencari tempat, kemudian tempat tinggalnya mungkin atau juga biaya untuk wira-wirinya apa Bahasa Indonesia wira-wirinya, itu akan semakin besar.

Kemudian, saya lanjutkan untuk yang WA kepada kami, banyak itu adalah nanti saya berikan Bu, WA-nya kepada Ibu, mohon maaf ini bukan-bukan soal partai atau apa, ini ada WA yang memerintahkan kepada para pendamping untuk membuat satu konten yang mengafiliasi kepada partai tertentu dan orang tertentu, ini sudah *nggak* bagus ini. Tolong ini juga

dievaluasi, jangan kemudian. Kita bolehlah memanfaatkan tapi jangan vulgar begitu caranya.

Siapa pun boleh memanfaatkan itu, saya kira partai manapun tetapi kalau sudah di kemudian di *coop (suara kurang jelas)* bawah ini adalah milik satu partai *nggak* juga begitu. Oleh karena itu, kenapa saya tadi minta ketika ada pergantian pendamping desa ataupun koordinatornya, umumkan kepada kami semua dan ini biasanya kalau disampaikan kepada kami waktunya tinggal dua hari, satu hari, mana mungkin kita bisa mencari orang, *nggak* bisalah dengan hal-hal semacam itu.

Selanjutnya, mohon maaf agak-agak sedikit banyak. Kepada, Pak, siapa yang paling, transmigrasi ya. Kembali ke pengembangan, termasuk BUMDes, Pak, pengembangan BUMDes juga ini mungkin ya, termasuk punyanya Ibu juga. Ini saya juga ingin *tau* BUMDes di Indonesia ini berapa *sih* semuanya yang hidup itu ya, yang hidup itu berapa meskipun kita mencapai menginginkan semua desa itu ada BUMDesnya, tetapi kita harus *tau* tidak semua desa punya kondisi yang sama, sehingga dalam penyusunannya itu juga demikian, mana yang sekiranya potensi untuk dikembangkan mana yang belum bisa, sehingga mana dan berapa...tahu berapa akan dikembangkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan sumber daya manusianya.

Saya tadi melihat misalnya BUMDes ada tahun 2022 ini tercapai 2.457. Kemudian tahun 2023 juga ada, lalu berapa sebenarnya yang mau digapai, dari 84 desa itu berapa...84 ribu sekian desa itu berapa yang ingin digapai di sekian tahun. Jangan sampai maksudnya sekedar ada tetapi sebenarnya tidak, hidup tak segan mati tak hendak begitu, tapi memang betul-betul BUMDes yang hidup yang mampu untuk bisa mengembangkan potensi di wilayah yang bersangkutan atau desa yang bersangkutan.

Termasuk desa wisata, saya mendengar desa wisata ini mudah-mudahan tidak *anu* lagi, ya, desa wisata ini kan harapannya semua desa punya desa wisata, harapannya begitu. Karena dalam rangka juga untuk potensi desa yang bersangkutan.

Namun demikian, saya juga ingin minta kepada Bapak-Ibu sekalian, desa wisata ini yang mau bisa dikembangkan ini berapa targetnya, berapa tahun 2002 sudah tercapai berapa? 2023 nanti akan mencapai berapa? sehingga tinggal berapa? Dari semua yang sudah ada ini yang betul-betul mau dititik beratkan untuk dikembangkan menjadi suatu desa wisata yang benar-benar desa wisata tidak hanya sekedar, itu berapa sehingga kita *tau* anggaran-anggarnya itu berapa jumlah yang dibutuhkan itu kita akan *tau*, tapi karena kita tidak pernah mendapatkan informasi tentang ini perkembangannya setiap tahun, data setiap tahunnya, karena kalau data ini yang disajikan kepada kita hanya 2002, 2003, mungkin nanti 2003, 2024, dan seterusnya, sehingga kita tidak akan pernah *tau* sampai sejauh mana perkembangan dari wisata-wisata yang memang kita bangun.

Dan, ini saya setuju dengan adanya pembangunan wisata desa ini meskipun Bapak-Ibu sekalian, dari jumlah anggaran yang diberikan kepada

desa wisata, khususnya yang 500 Juta yang sekarang mungkin tinggal 400 Juta, ya, kalau *nggak* salah, turun, semakin turun itu sangat dibutuhkan, dan mohon dengan hormat juga meskipun harapan *spek* dari wisata desa ini adalah *spek* yang bagus tetapi tolong dalam membuat *spek* itu juga atau mungkin pilihan-pilihan ini juga diberikan arahnya, jangan sampai di satu posisi, satu sisi saya sering menyampaikan toiletnya, toilet yang kualitasnya dalam luar negeri padahal tempatnya di desa, orang jadi bingung begitu mau...mau pakai itu bingung.

Maksud saya, kalau membuat *ren*...apa namanya anggaran itu juga yang imbang antara kebutuhan dengan yang ada. Saya setuju aspeknya bagus, tetapi mohon dengan hormat ini juga betul-betul dipertimbangkan secara baik.

Jadi, Bapak-Ibu sekalian, saya mohon dengan hormat apa yang saya sampaikan ini menjadi perhatian dan ini titipan-titipan tidak hanya dari saya tetapi dari teman-teman Komisi V yang tidak bisa hadir hari ini juga menyampaikan titipannya kepada kami, khususnya terkait dengan tenaga pendamping desa dan koordinator desa.

Ini bukan sesuatu yang dianggap angin lalu, tetapi itu riil, nyata di lapangan dan itu menjadi perhatian. Bahkan mohon maaf, mungkin-mungkin ini perlakuannya saja sudah beda Bapak-Ibu sekalian. Orang yang diindikasikan oleh mereka bukan partai tertentu yang mereka, itu disisihkan, tidak diberikan informasi, ini bener mungkin...mungkin dari teman-teman ini juga yang ada di sini juga demikian, ya. Jadi, bukan hanya karena saya, tetapi teman-teman yang lain juga-juga demikian.

Saya kira demikian dari saya dan mohon dengan hormat dan sangat, saya tidak hanya sekedar nanti dijawab secara tertulis, tetapi saya ingin jawaban langsung dari Bapak-Ibu sekalian, terkait, dan hal tersebut. Saya mohon dengan hormat, maaf kepada teman-teman Anggota Komisi V yang lain kalau saya minta dalam hal ini untuk secara tertulis supaya kita *tau* persis jawaban apa yang akan Bapak-Ibu sampaikan.

Demikian, terima kasih, saya akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih, Ibu Sri.

Jadi, Pak Sekjen, apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi agar menjadi pertimbangan dan mungkin teman-teman yang lain juga akan menyampaikan hal-hal yang sama. Tujuan kita sama satu, kita menginginkan agar program dari Kementerian Desa ini tepat sasaran, sehingga masyarakat bisa menikmati dari program Kementerian Desa. Selanjutnya, saya persilakan Pak Aras, silakan, Pak.

F – PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera untuk kita semua,*

**Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen,
Pak Irjen, dan
Ibu Kepala Badan, dan
Bapak, dan
Seluruh hadirin yang sama berbahagia,**

Tentu pertama-tama, tentu kami berterima kasih telah diberikan pemaparan yang cukup lengkap dari Pak Sekjen sampai ke Pak Kepala Badan, tentu dari beberapa paparan yang ada, yang pertama,, paling tidak kinerja tahun 2022, ya kami apresiasi anggaran walaupun dalam hal pelaksanaan lapangan masih ada beberapa hal yang tentu tidak maksimal sesuai dengan perencanaan yang ada. Akan tetapi, tentu kita harapkan bahwa capaian yang dicapai tahun 2022 *insya* Allah mudah-mudahan tahun 2023 nanti bisa lebih baik, baik secara anggaran maupun secara realitas di lapangan.

Kemudian, yang kedua adalah saya ingin fokus ke pendampingan desa yang targetnya kurang lebih 35 ribu orang untuk melayani kurang lebih 84 ribu desa, di seluruh Indonesia, tentu di dalamnya juga terdapat daerah yang tertinggal, daerah transmigrasi dan sebagainya. Realisasi 34.753 orang, tentu ini kami lihat bahwa 34 ribu ini, kami anggap bahwa ini adalah orang yang dipercaya untuk mengangkat kapasitas dari seluruh perangkat desa di seluruh Indonesia.

Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan penilaian terhadap 34 ribu ini. Oleh karenanya, kami mohon untuk bisa mengetahui per *person* dari daerah seluruh Indonesia, terutama misalnya dari Sulawesi Selatan. Tentu mulai dari koordinator sampai kepada tingkat daerah tentu kami ingin *tau* siapa-siapa orangnya dan mereka berada di mana, sehingga pengawasan yang akan kita lakukan tentu bisa lebih maksimal dan bila ada kekurangan-kekurangan tentu bisa kita cegah lebih awal sehingga hal-hal tertentu tidak bisa kita biarkan begitu saja.

Yang kedua adalah jumlah TWP yang ditingkatkan fasilitasnya yang targetnya 15 ribu orang, yang realisasinya cuma 10.990, tentu ini juga kami ingin *tau* apa yang menjadi kendala utama sehingga capaian ini tidak sama seperti yang lainnya yang bisa bahkan melebihi daripada target, terutama yang mengakses *platform* akademi desa dan sebagainya.

Yang kedua, yang terkait dengan *roadmap* untuk pencapaian Kementerian Desa ini, terkait dengan pembangunan kawasan pedesaan. Tentu

kita ingin *tau* persis bahwa, ini saya lihat ada sudah masukkan kepada 2024-2025, tentu kita ingin *tau* masa bakti Pak Jokowi sampai 2024. Tentu, target, apa yang menjadi target beliau untuk selesai tahun 2024 sudah sejauh mana capaian yang dicapai oleh Kementerian Desa, sehingga apakah periode 2024-2029 tidak perlu lagi ada Kementerian Desa atau bagaimana, sehingga tentu kita bisa *tau* persis bahwa sejauh mana kinerja yang dicapai oleh Kementerian Desa sampai hari ini, sejauh mana perubahan dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

Barangkali cuman itu, Pak Ketua, yang ingin saya sampaikan, terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih, Pak Aras.

Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Tamanuri, Pak, silakan, Pak.

F – P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pak Pimpinan, serta
Rekan-rekan Anggota Dewan,
Yang saya hormati Pak Sekjen,
Pak Kepala Badan,
Pak Kepala,
Pak Pusat, Kepala pusat, dan
Para Eselon II yang saya *banggakan*,**

Saya apresiasi, Pak, yang Bapak sampaikan tadi itu luar biasa, *nggak* ada lembaga lain yang 100%, Bapak sampai 100%, kalau ada yang 105% mungkin Bapak 105% itu. Ini adalah merupakan satu kejutan dan apa itu pekerjaan yang cukup memuaskan. Oleh karena itu, patut dipertahankan untuk masa-masa yang akan datang walaupun memang uang yang kelola *nggak* begitu banyak, tapi walaupun *nggak* begitu banyak kalau salah kelola *nggak* sampai *situ*, Pak, ini yang saya bangga sama Bapak ini, walaupun yang lain dari badan, dari pusat belum sampai 96-an masih bawah itu akan tetapi sudah memilih suatu kewajaran.

Apalagi yang namanya Irjen *segini* banyak masalah yang terjadi di Indonesia ini dari Sabang hingga Merauke, yang timbul 123 masalah sudah diselesaikan 85 masalah, ada yang tidak bisa diketahui 35 masalah itu sudah merupakan penunjukan suatu kemajuan yang luar biasa.

Oleh karena itu, harapan saya adalah kemajuan-kemajuan ini di masa yang akan datang kita terus tingkatkan agar supaya ada penambahan-

penambahan perbaikan-perbaikan di sana-sini. Kenapa, karena kementerian kita ini adalah satu kementerian yang cukup kecil, hanya mengelola uang sekitar 3 Triliun. Artinya yang paling banyak itu Ibu, *nih* 1,7 Triliun.

Jadi oleh karena itu, saya dari dulu mohon maaf jangan tersinggung, Pak, saya dulu kan mengharapkan supaya ini ada penciutan, penciutan Dirjen-Dirjen badan-badan itu digabung-gabungkan sehingga timbul 2-3 badan saja, 2-3 Dirjen saja sehingga dananya itu ya sesuailah 3 triliun dikelola oleh 2-3 badan yang penggabungan dari badan-badan yang lain ada hubungannya dan ini lebih efektif, efisien, ini harapan saya. Dulu saya, mohon maaf ini bukannya bukannya mengatakan bahwa tidak ada faedahnya.

Kemudian lanjut, mengenai dana desa, Pak. Dana desa itu kenapa ya saya mau bertanya ini, *kok* persyaratannya *kok* ada yang jauh sekali menurun dari 1 miliar sampai 700 juta, tapi ada juga yang naik dari 1,1 miliar sampai 1,7 miliar tapi kebanyakan yang menurun semua 7, 8, 9 apa itu juta ratus juta, itu ya. Jadi ini kenapa jadi masih begini, persyaratan-persyaratan apa.

Harapan saya adalah seperti dulu, seperti awal pertama 2016-2017, 18, 19, kita pertahankan hal itu. Kalau ini satu desa hanya mengelola 700 juta apa yang mereka bisa lakukan dengan banyaknya program yang harus dilaksanakan dari orang tukang pukul bedug sampai apa itu...yang anak-anak di bawah TK itu ini dikasih semua honor-honor, habis duit itu, jadi *nggak* ada lagi namanya untuk membangun infrastruktur.

Alhamdulillah syukur ada program-program aspirasi Komisi V dari Menteri Perhubungan, dari Menteri PUPR, dari Menteri Bapak sendiri juga, itu yang bisa memberikan bantuan sepenuhnya kepada desa sehingga desa kelihatan. *Nah*, ini kelihatan kemajuan sedikit-sedikit walaupun rumah 10, walaupun jalan 3 kilo, walaupun jembatan, kelihatan sedikit-sedikit, tapi kalau mengandalkan namanya dana desa tidak mungkin lagi, karena dana desa itu ada yang sampai 600 juta saja, satu desanya.

Jadi, harapan saya adalah untuk persyaratan mendapatkan dana desa itu besar kecilnya coba kita tinjau kembali, jangan terlalu kecil kasihan mereka itu, apalagi yang mereka bekerja kan.

Kemudian, bagi desa-desa yang belum punya kantor desa, bagi desa-desa yang belum ada balai desa, ini dialokasikan dana lain jangan masukkan dana desa, dana lain dari pusat ini dialokasikan ke dirjen manalah. Jadi, desa-desa yang betul-betul tidak ada balai desanya, tidak ada kantor desanya, memang ini terbukti-terbukti. Ini diprioritaskan untuk dapat dibantu, bukan seluruhnya tentu kita cari skala prioritas, sehingga nanti secara bertahap bisa kita bangun.

Kemudian, mengenai pendamping desa. Saya ketawa, Pak, pendamping desa ini, saya begitu bangun tidur sore baru ada pengumuman penerimaan, besoknya penerimaan bagaimana lagi, bagaimana lagi kita menyiapkan untuk ikut *testing* untuk pendamping desa. *Nah*, ini coba dirubah ini, kalau tahun-tahun yang akan datangnya ada lagi evaluasi, mohon 7 hari

atau dua hari, tiga hari, sebelumnya dikasih *taulah*, supaya saya tidak-tidaknya, seminggu ya, setidak-tidaknya walaupun kita ada apa-apa di situ ya kelihatannya agak lurus-lurus sedikitlah, tapi kalau besoknya jam 4 sore ini baru ini *udah-udah*, ya, sudah keterlalu kata Rhoma Irama ini, Rhoma Irama yang *ngomong* terlalu katanya dengan lagunya apa perlu saya lagu ini, *nah*, itu mohon itu Pak Sekjen yang saya hormati tolong ini jadi perhatianlah, jangan sampai Rhoma Irama nyanyi lagi, terlalu.

Kemudian, ini banyak ini pendamping desa 35 ribu orang, tapi ya jujur *aja* 35 ribu orang ini, ya, maksudnya kan kita *udah tau cuman* belum tentu bisa, belum tentu bisa Bu. Janganlah-jangan khawatir, Bu, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir ada dusta di antara kita. Jadi, ini ini Pak Dirjen, Pak Sekjen, inilah kritik saya ini, kritik saya ini, semoga dapat jadi perhatian, Bapak.

Atas perhatiannya terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Selanjutnya, saya persilakan kepada Pak Anwar Hafid, silakan, Pak.

F – P. DEMOKRAT (Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita sekalian.

**Bapak Ketua dan para Pimpinan, serta
Sahabat Komisi V yang saya muliakan,
Pak Sekjen,
Pak Irjen,
Pak Dirjen, dan
Kepala badan, serta
Seluruh jajaran yang saya hormati,**

Perkenalkan saya, karena ini untuk pertama kali saya rapat bersama Kementerian Desa ini, saya Anwar Hafid dari Dapil Sulawesi Tengah dari Fraksi Partai Demokrat.

Yang pertama saya ingin ke Pak Sekjen. Pak Sekjen, kalau saya melihat anggaran struktur anggaran keseluruhan ya, Pak, saya bisa menyimpulkan sebetulnya bahwa walaupun targetnya 100% saya kira ini menunjukkan bahwa kinerja Kementerian ini sebetulnya masih-masih akan maksimal lagi kalau anggarannya lebih banyak lagi itu, Pak. Ini menunjukkan karena saya lihat realisasinya sangat bagus.

Namun ada satu hal, Pak Sekjen, yang ingin saya sampaikan bahwa, kalau kita melihat ya, rincian anggaran, saya sepakat dengan Ibu Sri Rahayu tadi menyampaikan bahwa kita ini sebetulnya anggarannya kecil tapi hasrat kita besar, Pak. Keinginan Kementerian ini untuk membangun dan mensejahterakan desa sesuai dengan komitmennya itu sangat besar tapi tidak didukung oleh ketersediaan sumber pendanaan yang cukup, saya lihat.

Nah oleh karena itu, kalau keadaan seperti ini kan biasa berlaku itu rumus yang prioritas-prioritas aja, Pak. *Ndak* usah kita semua mau lakukan, *nah* ini yang saya mau minta dari Pak Dirjen, sebenarnya dalam rangka membangun dan mensejahterakan desa ini apanya *sih* yang kita mau harus sentuh desa ini, sehingga desa itu bisa berdaya. Kita *tau* persis bahwa, negara ini dibangun harus dari bawah, harus dari desa. Kalau kita bangun apapun, sehebat apapun kalau desa kita tidak berdaya maka kita akan terus-terusan seperti ini.

Maka oleh karena itu, saya ingin sekali, Pak Sekjen, bisa memberikan gambaran sesungguhnya dalam kaca mata kementerian ini apa *sih* sebenarnya persoalan desa sehingga ke depan ini kita akan segera meninggalkan status desa tertinggal itu. Kita tidak ingin lagi ini sebuah momok sebetulnya, negara kita ini sudah kemarin, Pak Presiden kita menjadi presidensi G20, tapi ternyata di negara ini masih banyak desa tertinggal.

Di Sulawesi Tengah itu, Pak Dirjen, ada kurang lebih 1.842 desa, ada 266 desa tertinggal dan 17 desa sangat tertinggal. Ini kan sesuatu hal yang ketika kita sering berbicara masyarakat ini sebetulnya sudah muak juga lihat kita ini bicara kehebatan negara ini tapi ternyata masih ada desa yang sangat tertinggal. Ini apa *sih* kerjaan kita sebenarnya.

Nah, oleh karena itu, ini tugas Kementerian Desa ini apa yang harus dilakukan menyentuh desa, sehingga desa ini lepas segera dari kondisi dari status desa tertinggal itu, itu yang pertama. Dan, termasuk saya masuk termasuk tadi soal pendamping.

Saya kira pendamping ini bukan *cuman* mendampingi desa dalam kaitannya dengan penggunaan dana desa dan sebagainya, tapi ini juga apa yang diharuskan, harus dilakukan, masukkan-masukan apa, sehingga kita segera keluar, kita segera hapus tidak ada lagi. Misalnya tahun 2024 Indonesia bebas desa tertinggal, bisa *ndak* itu dicapai.

Kalau ini kita tidak bisa capai berarti kita gagal, Pak, gagal kita 5 tahun kita melaksanakan program ini bahkan bukan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, status nama desa tertinggal ini sudah ada, Pak, tapi tidak selesai-selesai ini yang jadi pertanyaan saya apa ini, apa masalahnya, desa tertinggal ini tidak pernah hapus *gitu*, itu yang pertama, Pak Sekjen.

Yang kedua, terkait dengan...saya langsung saja ke Pak-Pak Sekjen sudah cukup, ya, tadi saya menambahkan saja teman-teman soal pendamping desa.

Kita ini kan bermitra ini, Pak, Komisi V ini adalah mitranya Kementerian Desa, salah satu tugas kami itu adalah mengawasi pelaksanaan pendamping desa. Kami di lapangan Jujur saja, Pak, begitu *tau* Komisi V ini mitranya Kementerian Desa banyak yang mengajukan aspirasi ke kami, Pak, “Pak kami juga mau jadi pendamping, bisa *nggak* Bapak diperjuangkan”. Saya bicara *aja* terbuka ini, Pak, saya kira bukan cuma saya, yang lain juga mendapatkan aspirasi yang sama.

Bisa tidak, ya, sebagai mitra, sebagai mitra tanda petik, Pak, ini ada kerja sama yang baik, sehingga aspirasi-aspirasi itu bisa tersampaikan. Jangan kami dibilang di Dapil kita *wah* ini Komisi V *sih* lebih banyak orang lain ya jujur saya perekrutan ini kan tidak semuanya, Pak, ideal ya. Ada juga *recruitment*-nya yang mungkin melalui katebelece, melalui nota, dan sebagainya, sehingga banyak juga yang mengeluh Pak, kami ini pak kalau dari sisi kemampuan kurang apa kami tapi tidak pernah masuk dalam seleksi.

Nah, ini bisa *ndak* ini, Pak, sebagai mitra kita bisa bekerja sama dalam mendampingi penerimaan tenaga pendamping. Saya kira tidak usah saya jelaskan secara detail, Pak, ini bentuk kerja sama, bentuk kemitraan, komitmen kemitraan kita.

Kemudian, saya ke Pak Inspektur Jenderal. Makasih Pak Sekjen, saya tidak akan mengutak-atik anggaran Pak Sekjen, karena sangat kecil saya lihat. Pak Sekjen sampai berdarah-darah otaknya tapi tidak bisa berbuat banyak karena anggarannya kecil, kita tidak *tau* juga negeri kita ini desa diperhatikan seperti ini, saya juga kaget, Pak. Nanti Komisi V ini saya kaget melihat bahwa anggaran desa itu sangat minim sekali, padahal desa ini adalah soko guru kita. Kalau Bung Karno bilang, “Desa itu adalah fondasi negara ini yang harus benar-benar mendapat perhatian”, mudah-mudahan ke depan kita bisa dengan adanya Undang-Undang Desa revisi ke depan mudah-mudahan jadi, ini bisa akan lebih meningkatkan kapasitas dan kualitas desa kita.

Yang kedua, soal Pak Inspektur Jenderal, saya banyak mendapatkan aspirasi Pak dari masyarakat, dari kepala desa, dan saya biasa mengalami saya banyak pengalaman soal desa. Saya pernah jadi kepala desa Pak Dirjen, 7 tahun saya jadi kepala desa, tapi waktu itu belum ada dana desa dulu itu waktu masih Inpres Desa (IDT), namanya.

Saya melihat sekarang waktu saya jadi kepala daerah, banyak sekali kepala desa itu tersangkut soal persoalan kasus korupsi. Yang saya *tau* persis bahwa, kepala desa itu bukan semata karena mereka korupsi memakan uang, mereka itu kebanyakan hanya persoalan administrasi. Ini fungsi inspektorat ini yang saya ingin sampaikan bagaimana membina, Pak, mungkin ada MoU dan sebagainya sehingga kepala desa kita ini tidak jadi sasaran *gitu*, sasaran orang-orang yang tidak senang kepala desa kemudian menjadikan misalnya karena persoalan administrasi, sehingga mereka terpaksa, ya, harus berurusan hukum. Ini-ini pekerjaan besar kita, ini luar biasa harus menjadi perhatian kita, Pak, kasihan kepala-kepala desa itu yang sudah bekerja untuk rakyatnya mengabdikan untuk rakyatnya, tapi karena kesalahan administrasi saja sehingga mereka harus terpaksa berurusan dengan hukum.

Jadi, kepala desa ini, Pak, serba salah di lapangan, tuntutan masyarakat itu besar dan kadang itu tidak sesuai dengan juknis dan juklak yang Bapak keluarkan dari Kementerian, dari Kementerian Keuangan dan sebagainya, Kementerian Dalam Negeri. Masyarakat, kami tidak mau dana kami, Pak, maunya ini, aspirasi kami ini, tapi juknisnya tidak boleh begitu. Ini Kepala Desa bingung, yang mau didahulukan yang mana aspirasi masyarakat atau juknas...juknis, ini *problem* Pak *problem* kepala desa.

Saya *tau*, saya merasakan dan saya banyak bersentuhan dengan kepala desa melihat persoalan ini banyak sekali kepala desa kita yang kasihan harus meringkuk dalam penjaranya karena kesalahan administrasi.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Pak Dirjen, ini perlu dilakukan pembinaan terus-menerus sehingga ada *win-win* solusi. Diskresi yang Bapak Presiden serang...sering lakukan itu biasanya tidak mempan Pak di bawah. Pak Presiden selalu bilang, ambil diskresi demi rakyat tapi kalau banyak orang yang tidak senang kepada kita, Pak, semua bisa dibuka-buka semua, itu yang kedua.

Yang ketiga, ada kepada Ibu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Soal BUMDes, ya, saya sangat sepakat bahwa BUMDes ini adalah solusi, solusi membangun desa. Kalau saya bisa mengusulkan di Kementerian ini sudahlah Pak, *nggak* usah bikin yang lain fokus di BUMDes, karena dengan hadirnya investasi yang banyak di Indonesia ini banyak BUMDes-BUMDes kita yang berhasil, tapi banyak juga BUMDes yang sama sekali tidak hanya sekedar nama. Saya melihat bahwa, kebanyakan yang nama itu disebabkan karena memang sumber daya manusia.

Jadi, Ibu saya sepakat ini harus dilakukan pelatihan terus-menerus, peningkatan kapasitas pengurus BUMDes kita di lapangan itu harus menjadi mutlak adanya kalau kita ingin desa itu berdaya.

Kemudian, dari Badan Pengembangan Informasi Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang pertama, soal tadi itu komitmen penguatan ya konsisten 20% alokasi untuk BUMDes. Itu saya kira harus-harus terus diwujudkan itu, Pak. Jadi, alokasi dana desa kita ini, komitmen 20% alokasi BUMDes itu...itu saya kira harus diwujudkan, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi saya sepakat teman-teman soal prioritas infrastruktur, ya, karena di desa menjadi persoalan bagi kita semua adalah daerah tertinggal ini, Pak, desa tertinggal Ini kebanyakan sebetulnya persoalannya karena infrastruktur di desa yang sangat minim. Saya melihat banyak desa tertinggal itu adanya, Pak, di kepulauan, di atas-atas gunung yang banyak *stunting* dan sebagainya, yang memberi kontribusi sehingga mereka dikategorikan menjadi daerah desa tertinggal itu rata-rata di daerah itu, Pak, daerah terluar, daerah kepulauan, daerah di atas pegunungan, yang memang akses transportasi sangat susah di daerah itu. Ini desa-desa, desa-desa kita yang sudah dibentuk puluhan tahun yang lalu tapi tidak pernah.

Dulu saya pernah mengingat ada status-status desa, Pak, ada desa apa namanya ada desa, ada tingkatan-tingkatan desa itu. *Nah*, ini tadi saya sepakat dengan Ibu Yayuk menyampaikan bahwa, ini harus ada *roadmap*.

Persoalan-persoalan desa kita ini, kan ada yang bisa diselesaikan satu tahun, ada yang dua tahun, ada yang tiga tahun, ada yang sampai lima tahun, ada mungkin yang sampai 10 tahun baru bisa selesai persoalannya. *Nah*, ini mungkin kami juga melalui Pimpinan, kita minta ini, Pak, *roadmap* tentang bagaimana mengentaskan desa tertinggal ini-ini harus-harus kita miliki, Pak. Kami juga Anggota Komisi V ini, Pak, malu juga, malu kita kalau sampai satu periode masih banyak daerah yang tertinggal, kerja kita apa membahas anggaran ini. Ini kan kerja sama semua kelembagaan, Pak, bukan cuma tugasnya kementerian, tapi kalau ada data itu...ada data soal daerah tertinggal ini, apanya yang jadi *problem* angkanya kira-kira apa, berapa, sehingga ini bisa kita kalau dia kekurangan infrastruktur berarti itu tugas kami untuk mem-*push* Kementerian PU untuk menggenjot di situ, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, ini semua terkait, Pak. Pengentasan desa tertinggal ini. *Nah*, kita butuh *roadmap* itu 5 tahunan, 10 tahunan, sehingga menjadi bahan bagi kami.

Kemudian, yang berikutnya soal daerah transmigrasi, ini juga daerah transmigrasi saya kira masih banyak daerah kita transmigrasi, Pak, yang sampai hari ini transmigrasi kita itu kalau saya bilang mereka ini hanya di...apa namanya ya di-*lock*. Kalau saya terlalu-terlalu tajam sinis kalau saya bilang mereka ini sekedar diungsikan. Banyak daerah-daerah transmigrasi kita susah Pak, saya punya data nanti, Pak Sekjen, nanti saya kasih.

Daerah transmigrasi mungkin bukan di zamannya Pak Sekjen, di zamannya lalu, di zaman-zaman 10 tahun yang lalu, sampai hari ini transmigrasi itu tidak berkembang, bahkan ada transmigrasi sekarang ini status tanahnya saja tidak jelas, Pak, ini. *Nah*, ini PR sebetulnya, yang begini-begini ini yang harus kita tuntaskan, jangan kita bicara digitalisasi desa dan sebagainya tapi persoalan mendasar begini luput dari pemikiran kita. Mereka ketawa, Pak, mereka itu, kita bicara bagaimana pengembangan BUMDes dan sebagainya, tapi lahan mereka sampai hari ini masih ada yang tidak bebas, lahan mereka paling bermasalah, meninggalkan keluarga jauh-jauh justru mereka di sana diterlantarkan, nanti saya kasih datanya, Pak.

Saya kira itu-itu saja, Pak, cukup, terima kasih, mohon maaf kalau tidak berkenan.

*Wallahul musta'an,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih, Pak Anwar.

Ini, Bapak-Ibu teman-teman sekalian.

Saya dapat informasi dari Bamus nanti setengah dua itu ada Rapat Paripurna. *Nah*, agar kita bisa mendengar jawaban dari Pak Sekjen dan para Eselon I-nya kita tertulis saja, saya harap pada waktu bertanya nanti dioptimalkan waktunya. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Hamid Noor Yasin.

F – PKS (Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya,*

**Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V,
Yang kami hormati Pak Sekjen,
Pak Irjen,
Bapak Kepala Badan,
Ibu Kepala Badan, beserta
Segenap jajaran eksekutif,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Terima kasih atas paparannya Pak Sekjen, Pak Irjen, Ibu Kepala BPSDM, dan Bapak Kepala Badan Informasi, Pak, ya Informasi Desa, Daerah Tertinggal.

Dari yang disampaikan, Pak Sekjen, ini luar biasa untuk serapan anggarannya, *nyaris* sempurna Pak, 99,61%, kemudian Pak Irjen, 97,98%, kemudian BPSDM, 99,05%, kemudian Pak Kepala Badan, tadi 95,14%. Mudah-mudahan pelaksanaannya betul-betul amanah dan penuh dengan tanggung jawab sehingga mempunyai dampak positif untuk pembangunan di Kementerian Desa dan masyarakat di desa-desa.

Bapak-Ibu sekalian,

Terutama kepada eksekutif.

**Pak Sekjen,
Pak Irjen,
Ibu Kepala Badan, dan
Kepala Badan,**

Dari beberapa yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu, itu yang paling menonjol disorot adalah masalah dana desa. Kami ingin memberikan saran dan masukan terkait dengan pengelolaan dana desa ini sebetulnya semuanya kita ingin berupaya agar pelaksanaannya ini semakin ke depan semakin bagus, ya. Ini sebetulnya ada sedikit persoalan terkait dengan atau perlu dievaluasilah mungkin bahasa kita Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor

8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Tahun 2023, Pak.

Jadi, permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan bahwa, dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3% dari Pagu Dana Desa, setiap desa, dan bantuan langsung tunai dana desa dialokasikan maksimal 25% dari total Pagu Dana Desa di setiap desa.

Di samping itu, Pak Sekjen dan jajarannya, ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Terkhusus ini, Pasal 35 menyebutkan bahwa, pemerintah desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa diutamakan penggunaannya untuk, satu, program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran dana desa.

Yang kedua, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari anggaran dana desa. Yang ketiga, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran dana desa termasuk penggunaan lumbung pangan desa, dan yang terakhir dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada badan usaha milik desa program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program kegiatan yang lain.

Nah, akibat ketentuan-ketentuan ini akhirnya dana desa yang benar-benar dapat dikelola kepala desa atau desa hanya kurang lebih sekitar 32%. Artinya, ini jumlahnya menjadi sangat sedikit sekali, inilah yang menjadi hambatan-hambatan dalam kerangka optimalisasi pembangunan di desa, terutama yang berkaitan dengan program-program prioritas desa yang menyangkut masalah infrastruktur untuk memperbaiki arus hubungan antar desa maupun untuk peningkatan roda perekonomian desa.

Ini menjadi persoalan-persoalan di desa, bahkan banyak desa-desa yang tidak bisa memperbaiki kantor balai desanya karena memang tidak tersedia anggaran untuk perbaikan, banyak kalau kita di Dapil itu Pak, kita jumpai atap-atap kantor-kantor desa yang sudah pada rapuh, sehingga kalau hujan turun dia sudah bingung untuk rapat, untuk kerja, untuk menangani administrasi desa itu kesulitan karena kantor-kantor desa tidak bisa di-*support* dengan pembangunan di desa dengan dana desa itu. Itu beberapa persoalan yang menyangkut persoalan desa sebagaimana yang telah disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu.

Kemudian, dari BPSDM, saya ingin menyoroti sedikit dari hampir sama dengan yang disebut oleh teman-teman yakni, yang pertama terkait dengan sertifikasi, jumlah TPP yang tersertifikasi, ini masih jauh dari target, realisasinya hanya 3.916 orang padahal mereka memiliki peran dan fungsi strategis untuk mendampingi desa dalam konteks pembangunan desa. Kemudian, pelatihan masyarakat, jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan dari target juga masih jauh, kemudian peningkatan kapasitas PSM juga masih jauh karena baru

424 orang. Ini mohon diberikan penjelasan, Ibu, kendalanya apa, persoalannya apa, saya yakin kita semuanya sepakat memiliki cita-cita dan semangat yang sama agar kita bisa memberikan kontribusi terbaik terhadap tugas dan tanggung jawab...tanggung jawab kita termasuk memajukan desa-desa di seluruh Indonesia ini.

Terima kasih, Pak Sekjen, beserta segenap jajarannya, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang memuaskan untuk kita semuanya. Terima kasih, Ketua. Saya kembalikan mohon maaf kalau ada salah dan khilaf.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih, Pak Hamid.

Selanjutnya saya persilakan ke Pak Eddy Santana, silakan, Pak.

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan Komisi V yang saya hormati, beserta
Seluruh Anggota yang hadir fisik maupun *virtual*,
Para pejabat Eselon I Kementerian Desa dan Transmigrasi,
Sekjen,
Irjen,
BPSDM, dan
BPIN...BPID, maaf, beserta
Seluruh jajaran,**

Sebetulnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi mirip-mirip juga dengan teman-teman tadi. Yang pertama untuk BPSDM, masih ada ganjalan saya itu bertanya dalam hati apa apa ini udah tepat *gitu* bener, soalnya belanja pegawai 64 miliar lebih *gitu* kan, belanja barang 1,7 triliun, belanja modal 3 miliar, sehingga total 1,78 triliun.

Nah, padahal di 1,7 itu membayar honor itu, honor daripada pendamping. Apakah ini tepat masuk dalam belanja barang, itu saya kira harus ada evaluasi juga. Jangan-jangan karena ini aturan *oh* tidak boleh belanja pegawai jangan sampai melebihi belanja modal belanja barang persentasenya, jadi dimasukkanlah belanja barang, itu orang, Pak, bukan barang. Jadi, saya masih-masih ada ganjalan pertanyaan. Sudah lama berapa kali saya tanyakan ini, tapi tidak ada perubahan.

Nggak apa-apa, Pak, kalau memang harus ada, harus ada ini belanja ini harus dipakai untuk honor pendamping, ya, silakan, *ndak* masalah, karena ini yang kami bisa lakukan Kementerian Desa, kan begitu jawabannya.

Nah, kemudian saya terus terang masih menginginkan Kementerian Desa ini besar, Pak, sehingga 80 ribu lebih itu, ini *ndak* ada yang sama berarti Kementerian Dalam Negeri, BPS itu ya, Kementerian Desa, saya percaya berapa *sih gitu* jumlah desa itu. Saya kira Kementerian Desa lah yang paling tepat yang bisa mendata paling tepat jumlah desa, beda-beda Pak, memang bergerak ya desa itu ada pemekaran barangkali itu tapi ya terus di-*update gitu* kan. *Nah*, ini tugas dari mungkin badan pengembangan informasi desa juga.

Jadi, saya terus terang menginginkan itu, menginginkan ini jadi Kementerian besar *gitu*, karena ini urusannya urusan desa itu urusan memang rakyat yang paling di desa-desa *gitu*, sedangkan APBN kita ini, ya dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat, rakyat banyak di desa *gitu*, di 83 ribuan desa tadi.

Mungkin anggaran 3 lebih kurang 3 triliun itu sangat jauh dari harapan *gitu*, sangat kurang *gitu*. Minimal 10 triliun desa ini, bagaimana perjuangan kita ke depan ini supaya Kementerian Desa ini bisa-bisa jadi lebih besar, sehingga ada program yang jelas *gitu*, program yang jelas.

Tadi misalnya Pak, ya, dari Badan Pengembangan Informasi Desa itu ada *roadmap*, peta jalan, terus kita hanya buat itu aja selanjutnya tindak lanjutnya apa *gitu*, apakah ada kita bangun jalan poros desa misalnya, *nah* ini *ndak* ada seperti itu *gitu*. Saya kira ke depan harus ada evaluasi kita itu, jadi mana yang tadi teman-teman sampaikan yang prioritas apa yang harus dilakukan, dan saya inginkan Pak, *output* itu mana Pak, contohnya, *roadmap*, peta jalan desa itu yang di transmigrasi ataupun desa tertinggal itu mana hasilnya itu, tolong tunjukkan ke kami.

Contoh saja, karena kami kan diskusi juga, menurut kami kalau transmigrasi udah jelas ada, Pak, sudah, dari awal sudah ada *map*-nya itu udah tertera peta jalan ada, sudah ada, dibuat dulu baru dipindahkan orangnya *gitu* transmigrasinya dulu. *Nah*, itu jadi pertanyaan saya, apakah misalnya di Sumatera, ya, Sumatera, Kalimantan masih dibutuhkan, kalau Sumatera saya kira tidak dibutuhkan lagi transmigrasi itu. Papua mungkin masih *gitu* di pulau-pulau tertentu tapi di kami, karena infrastruktur sudah bagus, hubungan antara Jawa, Bali, Jawa, dan Sumatera sudah bagus, ya transmigrasi spontan banyak, silakan saja mau pindah.

Mungkin ada kerja sama antar Bupati, Bupati nawarkan kami kurang orang, kurang manusianya pekerja *gitu*, silakan dari Jawa, dari Bali, dari mana yang padat *gitu* kan, atau mungkin dari-dari setempat sendiri ya dari kota-kota di Sumatera sendiri bisa berpindah *gitu* ya.

Jadi, saya ingin jelas *gitu*, jadi disampaikan juga pendamping *gitu* kan, pendamping ini sama itu, saya kaget juga ada pengumuman tapi sehari apakah cuman main-main *aja* ini sudah disiapkan dari jauh hari, *nah* kamu siap-siap saja udah semua baru kita umumkan *gitu* kan, jadi *nggak* bisa lagi ada kesempatan orang lain masuk *gitu*. *Nah*, ini kan *nggak* bener seperti ini rekrutmen, saya kira untuk ke depan mohon ini dievaluasilah rekrutmen untuk pendamping desa ini.

Dan, kami kan sering, Pak, ke desa-desa, saya tidak banyak melihat pendamping itu. Jadi, kalau misalnya kita ini kan mitra kita ini, Komisi V misalnya ke mana turun ke desa, ada *dong* pendampingnya mana, kita ikut menentukan honor mereka juga ya kan, bersama-sama kita memutuskannya di sini. *Nggak* pernah *tuh* saya, saya sering nanya pendamping desa, *ndak* ada *tuh*, jadi di mana dia adanya.

Tanya juga Pak Kades, apakah pendamping desa terus mendampingi, *ndak* juga seperti itu. Saya kira ini-ini untuk catatan *gitu* ya, untuk evaluasi pendamping desa itu benar-benar jadi pendamping desa yang-yang handal *gitu* kan, yang *tau* masalah administrasi desa tadi kan, masalah yang pokoknya bagaimana upaya kita mensejahterakan desa tersebut *gitu* ya, itu pendamping. Satu pendamping mungkin lebih dari satu desa kalau melihat jumlahnya 35 ribu dibanding 83 ribu desa, *gitu* kan, ada dua desa ada tiga desa mungkin.

Saya ingin memang pendamping itu betul-betul ini, karena kita lihat uang yang diterima oleh desa *gitu* kan, *nah* itu bukan dari Kementerian Desa, Pak. Yang 1 miliar rata-rata ya, mungkin ada di bawah ada di atas, itu langsung dari transfer dari Kementerian Keuangan ke desa, *gitu* kan. Sehingga tugas pendamping ini untuk juga ikut mengelola, ikut mendampingi dana desa itu seakan-akan, ya, kepala desanya ada acuh *tak* acuh juga. “*Loh*, kamu bukan yang dikirim dari Kementerian Keuangan dampingi dana ini *gitu*, untuk mengelola dana dari Kementerian”, beda Pak, jadi kepala desa tidak pengaruh dari pendamping itu untuk kepala desa tidak begitu besar kira ini, ini harus seharusnya ada-ada evaluasi, *gitu* ya.

Nah, jadi inilah mungkin, saya-saya menginginkan dari hati kecil saya Kementerian Desa ini bisa besar *gitu*, kita bisa membangun infrastruktur desa. *Nah* Bapak-Bapak Ibu sekarang berterima kasihlah dengan Komisi V ini, kami sudah berhasil menembus revisi Undang-Undang Jalan, Pak, Undang-Undang Jalan, APBN untuk kesejahteraan rakyat bisa untuk dalam provinsi untuk jalan kabupaten, bukan hanya jalan nasional, bagaimana jalan desa dikelompokkan dalam kabupaten direvisi itu ke depan. Nanti kalau ada Inpres jalan mungkin desa desa bisa disentuh juga.

Terakhir mungkin himbauan saya terutama daerah-daerah transmigrasi, itu kegotongroyongan itu masih kental itu. Jadi, kalau ada program yang bagus misalnya perbaikan jalan poros misalnya hanya diberikan bahan misalnya *paving block*, mereka bisa bekerja sendiri, gotong royong sendiri, sehingga jalan-jalan poros desa itu bisa lebih baik dari kondisi sekarang, khususnya di tempat saya ,Pak, mana ada yang bagus itu di Kabupaten Banyuasin itu transmigrasi yang berhasil tapi jalannya *nggak* ada yang bagus itu. Jangankan jalan-jalan pelosoknya, jalan poros desa saja tidak ada yang baik.

Nah, ini, jadi saya kira ini yang saya ingin sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Sudjadi, silakan, Pak.

F – PDIP (Ir. SUDJADI):

*Assalamualaikum, Pimpinan,
Assalamualaikum,*

Terima kasih, Bapak, saya pendek *aja*. Saya ini kagum dengan badan pengembangan infrastruktur desa ya, namanya apa lengkapnya, badan pengembangan informasi, ini Bapak-Bapak Anggota DPR, 106 miliar tapi bisa membuat prestasi 12 realisasi, lalu ada lagi 18 realisasi ada lagi.

Pertanyaan saya Pak, ini Pak, ini, berapa *sih* Eselon II-nya, kalau masih ada Eselon III berapa, terus perjalanan dinas itu kalau keluar Jawa dan sebagainya itu berapa, sehingga uang 106 juta, 6 miliar itu *kok* bisa untuk 3 lembaga ini yang hasilnya sungguh hebat, kalau itu memang benar saya kira, Ketua, ini untuk contoh kementerian-kementerian lain untuk-untuk nyontoh ini 106 miliar tiga wilayah, wilayah apa...baru tiga wilayah badan Eselon II tapi menyelesaikan bermacam-macam aturannya.

Pertanyaan yang terakhir, hasil buku itu yang membaca siapa, *gitu aja*. Kalau penutup kalau Bapak-Bapak tadi dari Ibu Rahayu bingung tentang dana desa, mungkin namanya dirubah *aja*, Pak, dana *anu*...dana bukan dana desa, tapi dana pendamping desa, ya, tugasnya dana pendamping bukan dana desa, karena kebetulan kalau kami itu dengan daerah dengan kades-kades *akrab* saya ancam. Kalau ada pendamping desa *ngancam-ngancam* menarik kamu ke bidang politik, *tak* putus realisasi...*anu*...*anu* aspirasinya, *alhamdulillah* di desa-desa kami kepala desanya taat, tidak mau diarahkan ke mana-mana kecuali pengawasan pendamping desa.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sudjadi.

Jadi itu, Pak Sekjen, ini teman-teman banyak bertanya tentang rekrutmen pendamping ini seperti ini. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Hamka, silakan, Pak.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dari seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Sekjen,
Pak Dirjen,
Ibu BPSDM yang saya hormati, dan
Seluruh jajaran,**

Saya pertama, ke Pak Sekjen dulu, di dalam *scope* penugasan...ketugasan Bapak, sebenarnya itu kan, di situ seluruh surat-menyurat ya, Pak, ya. Ada satu MoU yang ditandatangani di Kepri, mengenai penyerahan kerja sama antara BUMDes dengan proyek IBM dari Kementerian PUPR, infrastruktur berbasis masyarakat. Apa Bapak *tau* itu? Dan kalau Bapak *tau* saya kira itu tidak layak untuk dilakukan, masih banyak aspek usaha yang harus dipikirkan oleh BUMDes, jangan masuk ke situ bukan berarti saya larang, tetapi BUMDes itu hakekatnya kan memang ada di desa, yang disasar ini pekerjaan infrastruktur berbasis masyarakat, infrastruktur berbasis masyarakat hampir-hampir itu aspirasinya Anggota semua, utamanya dari Komisi V.

Karena itu MoU-nya dengan Kementerian PUPR, bener *nggak* itu, Pak? Mudah-mudahan tidak benar. Kalau *toh* benar tolong dipikirkan dengan baik ya, itu yang saya dapatkan informasi dari sana, Pak, dalam rangka hari BUMDes nasional.

Pada hakekatnya BUMDes itu kita sebenarnya mau melihat di situ ada lembaga ekonomi, saya hadir di ruangan ini kelahiran BUMDes. Pada hakekatnya adalah kehadiran di situ hanya sebagai lembaga ekonomi yang sifatnya permanen di desa. Jangan juga selalu semua usaha yang gampang-gampang langsung *diembat gitu* loh. Tetapi kan masih ada usaha masih mana persoalan pupuk, mana persoalan-persoalan pengadaan pangan yang lainnya.

Saya ambil contoh di daerah saya, Pak, di sana itu ada satu daerah desa membutuhkan modal kerja BUMDes besar itu rumput laut, Pak, itu besar juga *tuh*. Ini yang saya ingatkan pada Pak Sekjen untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu, karena benturan semua di Komisi V ini. Bukan berarti saya larang ya, Pak, ya, tetapi itu coba dicek-cek dulu deh IBM di Kementerian PUPR itu hampir merupakan aspirasi, bukan berarti...apa namanya, biarkanlah masyarakat mengerjakan itu sendiri, bukan-bukan pekerjaan badan usaha itu dalam infrastruktur berbasis masyarakat itu adalah pekerjaan proyek irigasi misalnya yang dikerjakan oleh masyarakat di situ sendiri. Tidak perlu ada badan usaha di situ ya, Pak ya, Pak Sekjen, tolong ini menjadi atensi, ribut semua kita ini di Komisi V, *nih*.

Kemudian yang kedua, Pak Sekjen, saya ingin *tau* sebenarnya sampai sejauh mana efektivitas kerjaan Bapak kaitannya dengan *automatic adjustment*. Karena 2023 belum berjalan anggaran sudah langsung keluar surat dari Kementerian Keuangan ada AA (*Automatic Adjustment*), yang Bapak kenanya 19 miliar tetapi kalau secara keseluruhan kementerian itu Kementerian Desa itu 199, ini...ini perlu diperjelas dulu, Pak, ya walaupun ada karena di situ ada belanja modal, ada belanja barang juga, padahal sebenarnya seyogianya yang berkaitan belanja...bukan belanja modalnya, belanja

barangnya mungkin yang harus dipikirkan. Kalau belanja modal janganlah, kira-kira itu, Pak Sekjen.

Kemudian yang ketiga, untuk Pak Sekjen. Dalam waktu singkat DPR sudah akan masuk prolegnas, ya, Undang-Undang Desa. Jangan kita ikut-ikutan, mari kita berpikir secara jernih nanti di dalam merevisi Undang-Undang Desa itu, ya. Jangan sampai ada warna lain sudah mengklaim, warna ini mendukung 9 tahun, kita juga bisa mendukung *kok*. Ini merevisi Undang-Undang ini harus cermat betul Pak Sekjen, ini saya titipkan, mudah-mudahan ada Komisi V yang ikut karena ini adalah mudah-mudahan revisi Undang-Undang ini bersifat Pansus bukan hanya di Komisi II, karena ini lintas.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Permisi, Pak, tambahan kurang, Gubernur dicabut jabatannya.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Nah, itu lagi Gubernur dicabut jabatannya tambah, Pak Sudjadi, bayangin itu, Pak. Janganlah masuk pada ranah-ranah itulah, ya, itu saja, Pak Sekjen.

Selanjutnya, untuk BPSDM, Ibu, pertanyaan saya, masih perlukah itu pendamping harus dipertahankan. Kenapa, kerjanya juga tidak jelas, tidak mempengaruhi pekerjaan kepala desa *kok*, hanya pajangan saja pendamping desa itu, tapi kalau masih perlu mari kita kaji tugas-tugasnya, jangan kaitanya dengan sistem informasi yang dibangun, jangan *nyelip-nyelip* juga soal-soal warna di situ, Pak, harus ada konten warna ini, harus ini dan sebagainya. Janganlah, betul-betul BPSDM ini memikirkan dengan baik, dengan akal sehat bukan maksud dalam akal politik, proporsionallah memikirkan itu.

Jadi, pertanyaan saya kadang-kadang apa masih perlu pendamping desa, yang anggarannya 1,6 sampai 1,7 triliun. Sedangkan di sisi lain, anggaran desa itu *mandatory* semua. Dijelaskan di situ bahwa, sekian-sekian persen untuk honor, sekian persen untuk BLT dan sebagainya, semua mana tidak bisa bergerak kepala desa, tidak fleksibel menggunakan anggaran. Ya, itu kira-kira pemikiran saya tapi kalau memang perlu *ayo* mari kita kaji dengan baik pendamping desa itu, 34 ribu.

Yang mendesak menurut saya, menurut pemikiran saya, Bu BPSDM, ya, pelatihan bagi petugas-petugas BUMDes itu yang mendesak. Adakah data di informasi, sistem informasi ini bisa memberikan kepada kita informasi sudah berapa besar volume usaha BUMDes, ini bom waktu nanti kalau kita tidak tata dengan baik ini BUMDes, jangan sampai kejadiannya sama dengan BUD KUD semua akhirnya *game over*. Ini yang saya minta dikaji dan benar-benar yang prioritas dididik itu adalah petugas-petugas BUMDes, saya kira itu di BPSDM.

Kemudian Inspektorat, Pak. Di situ ada penemuan *audit* tertentu, boleh *nggak* diberikan informasi secara tertulis sebentar, *audit* tertentu itu ada di mana dan kejadiannya apa? Karena ini *audit* khusus dan apa hasilnya? Ini-ini-

ini yang penting juga diinformasikan kepada kami karena di situ ada *audit* tertentu ya, Pak, ya. *Audit* tertentu itu kaitannya kasus apa?

Dan, yang terakhir untuk Pak Inspektorat, bagaimana tanggapan Bapak dengan *statement* kejaksaaan agung bahwa untuk sementara diinstruksikan kepada Kejari seluruh Indonesia, untuk tidak melakukan penyelidikan kasus apabila ada informasi kasus dalam penggunaan dana desa. Ini-Ini baru *loh*, Pak, ini saya harapkan menjadi bahan pemikiran, Bapak, bahan masukan Bapak karena ini diucapkan oleh Kejaksaan Agung *loh*. Wajar *nggak* di situ dengan alasan bahwa, kepala desa itu orang swasta murni, tidak mengetahui pertanggungjawaban keuangan negara dan sebagainya, dan sebagainya. Itu *statement* yang keluar dari mulutnya Jaksa Agung.

Jadi, seakan-akan kepala desa itu adalah swasta murni yang tidak *tau* pertanggungjawaban keuangan desa, bagaimana tanggapan Bapak terhadap itu, terutama tanggapan Kementerian Desa itu.

Saya kira, sistem informasi tolong dikembangkan dengan baik, tolong dikasih kepada kami, ya. Ada data perbatasan antar desa sudah-sudah itu bagus, asal jangan disisipi dengan informasi semua pendamping desa harus memusatkan, memasukkan konten dan dilaporkan kepada Bapak, *wah* itu sudah terlalu vulgar kata Bu Sri, ya, janganlah kita masuk di situ, Pak, ya. Mari kita rasional semua di dalam berpikir dan bertindak.

Saya kira itu saja, Pak Ketua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Terima kasih, Pak Hamka.

Selanjutnya saya persilakan, Ibu Cen, silakan, Bu.

F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan, dan
Teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Sekjen,
Pak Irjen, dan
Kepala Badan,**

Pak Sekjen, saya langsung saja mengenai MoU, saya rasa tidak perlu dicek lagi, karena memang rencana itu memang sudah diadakan cuma belum tanda tangan mungkin, karena saya hadir pada tanggal satu, tanggal dua, Pak Menteri datang dan informasinya tanggal dua akan dilaksanakan MoU untuk memberikan semua program Padat Karya kepada BUMDes.

Seperti yang dibicarakan Pak Hamka, program Padat Karya PUPR itu infrastruktur berbasis masyarakat dan memang selama ini dikerjakan, diberikan, disalurkan oleh Kementerian PUPR kepada masyarakat langsung tidak kepada badan hukum yang namanya BUMDes dan kita mengetahui juga BUMDes di Indonesia itu, 40% nya masih belum berbadan hukum.

Apa pemikiran, dasar pemikiran dari Kementerian Desa untuk melaksanakan MoU itu, karena kalau hanya alasannya untuk supaya menghidupkan BUMDes, itu tidak perlu seperti itu atau kalau memang untuk meningkatkan perekonomian desa itu sudah langsung dilaksanakan oleh kita-kita melalui program PUPR.

Secara spesifik, program masa...kemasyarakatan oleh PUPR itu lebih mengena dari program yang biasa diadakan oleh pihak Kemendes. Jadi, tolong diberikan pemaparan kepada kita sebagai Anggota Dewan Komisi V, karena kita ini *nggak* pernah dilibatkan.

Saya kemarin bertemu dengan Balai, saya ditanya "Ibu Padat Karya ini apakah harus diserahkan kepada BUMDes", bahkan informasinya program Padat Karya P3TGAI, juga akan diserahkan kepada BUMDes, karena itu saya sangat heran karena kita-kita ini belum pernah mendapat suatu pemaparan bahkan belum *tau* semua.

Jadi, tolong dijelaskan Pak Sekjen kita ini semua mau *tau* dan kita ini semua menolak, bukan artinya kita mengecilkan BUMDes tapi yang selama ini, yang sudah diadakan adalah langsung kepada masyarakat sendiri.

Terima kasih.

Terima kasih, Pimpinan.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Saya interupsi sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Ya silakan, Pak.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Saya memberi pemahaman kepada teman-teman desa, PKT itu idenya Presiden, Padat Karya Tunai, *by name by address*, selesai pekerjaan langsung bayar, lah kalau *ngurus* BUMDes *terus* caranya *gimana*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya Pak, nanti dijelaskan sama Pak Sekjen. Selanjutnya saya persilakan Ibu Sri Wahyuni.

F – P. NASDEM (SRI WAHYUNI):

Makasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi V,
Yang saya hormati Dirjen,
Irjen,
Sekjen,
Pak Kepala Balai,
Kepala Badan, beserta
Seluruh jajaran, dan
Yang saya cintai rekan-rekan Komisi...Anggota Komisi V,**

Saya langsung saja, sebenarnya hampir mirip-mirip saja dengan teman-teman yang lain tetapi yang ingin saya tekankan pertama yaitu terkait Dirjen PPK Trans, Pak Transmigrasi. Tolong, Pak lihat saya, belum ada ya? *Oh* BPSDM, BPSDM saja.

Terkait, pelatihan-pelatihan yang sering dilaksanakan oleh BPSDM ini, itu saya rasa jangan sekedar seremonial saja, tetapi dan juga jangan hanya untuk menghabiskan anggaran saja. Jadi, benar-benar apa yang sudah dilatih itu ada hasilnya begitu. Jadi, ke depan setelah pelatihan apa yang bisa dilakukan oleh BPSDM agar supaya hasil daripada pelatihan itu bisa ditunjukkan ke masyarakat. Jangan sekedar seremonial atau sekedar menghasilkan apa menghabiskan anggaran saja, Ibu *gitu*.

Lalu untuk Setjen...Sekjen, selama ini program-program yang ada di Kementerian Desa itu bersama-sama Komisi V kan yang bisa kita bawa ke dapil itu hanya dua unggulannya, yaitu BUMDes dan desa wisata, sedangkan BUMDesnya itu cuma sedikit, kalah dengan yang dibawa yang di apa...yang diberikan Bupati desa-desa itu biasanya bisa sampai 40, Pak, setahu saya itu. Ini dari Komisi V DPR RI loh, cuma berapa sekarang 5/10 *gitu*, cuma sedikit, Pak.

Jadi, kadang-kadang kita malu juga kalau ke desa bawa BUMDes cuma segitu *gitu loh*, terus desa wisata ini sekarang ini merupakan apa namanya yang diharap-harapkan oleh kepala desa. Jadi, kepala desa yang sudah mengajukan ke saya itu banyak sekali, tetapi yang kita bisa bawa cuman satu begitu. Ya, ini kita tidak bisa-bisa, tidak bisa salahkan Kementerian juga, karena memang Kementerian Desa ini Kementerian yang paling sedikit anggarannya.

Nah, ke depan bagaimana solusinya, Pak, agar supaya program-program terutama yang dari Komisi V itu kan banyak mau *nih*, Kementerian Desa juga pasti *pengennya* banyak kegiatan banyak program-program yang bisa dibawa ke desa tetapi anggaran tidak ada, mungkin bisa bicara. Pak Menteri bisa bicara dengan Menteri Keuangan begitu. Jadi, jangan didiamkan saja begitu daripada nanti setiap rapat kita omelin terus *gitu*. Ini *kok* programnya cuma segini *gitu*, Pak, dan Komisi V juga bisa eksis-eksis-eksis beneran di Dapil masing-masing begitu ya, Pak, ya, bagaimana, Pak, nanti tolong disampaikan ke Pak Menteri nanti kita rapat dengan Pak Menteri juga akan saya sampaikan.

Selanjutnya terkait, saya juga ingin sama dengan teman-teman yang lain terkait dana desa. Dana desa itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh Kepala Desa. Bagaimana bisa membangun desa kalau anggarannya sedikit setelah itu dikurangi.

Kepala desa itu tanggung jawab dan kebutuhannya banyak, Pak, dari a sampai z. Contohnya misalkan kita datang ke desa, Pak, itu biasanya *disangoni* apa dibawain macam-macam *nih*, Pak, itu kan juga duit, Pak, tidak kurang dari 10 juta, Pak, 5 juta, kalau kita dibawain oleh-oleh itu, *nah*, itu hal-hal kecil. Belum lagi mereka ingin membangun...apa namanya...membangun kantor desa. Banyak yang saya dapati, kami dapati karena saya berasal juga dari-dari daerah dan sering keliling desa itu kantor desanya itu jelek Pak, jelek Pak.

Beberapa minta mengajukan proposal ke saya, saya bilang tidak ada program dari Kementerian Desa untuk membangun gedung atau kantor desa, yang ada mungkin Pak Kades minta aja ke Bupati begitu, Bupati *nggak* ada duitnya katanya begitu, Pak, karena kan banyak dikurangi juga dari kepala-kepala apa kepala daerah.

Selanjutnya, saya mau protes *nih* Pak, waktu itu di dapil saya di Ponorogo ada kegiatan mungkin peresmian saya tidak *tau* jelas, saya cuma dapat laporan beberapa orang, *kok* Ibu tidak hadir di peresmian yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Saya bilang peresmian apa ya, saya tidak *tau* walaupun kalau saya apa diundang belum tentu saya hadir begitu *loh*, tetapi paling tidak saya diberikan informasi bahwa kami akan melaksanakan peresmian ini begitu jadi saya *tau*, walaupun saya tidak hadir saya *tau* dan ditanya masyarakat itu saya paham *gitu* dan akan saya jelaskan kenapa saya tidak hadir begitu, Pak. Jadi sebagai Komisi V kan saya wajib *tau* apa yang ada, kegiatan dari Kementerian desa yang ada dilaksanakan di dapil saya. Saya rasa itu Pak, Bapak-Ibu dari Kementerian Desa.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Ya selanjutnya saya persilakan, Pak Sumail, dan terakhir nanti Pak Syahrul, Pak Sumail silakan.

F – P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera bagi kita semua,

Tentu yang pertama, ucapan terima kasih kepada Pimpinan, kedua Pimpinan di atas memimpin rapat ini dengan luar biasa semangat hingga sekarang.

**Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu Anggota,
Bapak-Ibu Kepala Badan dari Kementerian Desa, dan
Segenap jajaran,**

Dari paparan tadi ada beberapa catatan yang saya coba kemukakan pada kesempatan kali ini. Pertama, ke Pak Sekjen. Hal yang terpenting saya kira, Pak Sekjen, adalah menurut pandangan saya bagaimana konsolidasi internal Bapak harus lakukan sedemikian rupa dalam rangka penguatan kinerja dan akselerasi tentu dalam peningkatan pembangunan desa.

Ada perlu *grand design* yang harus disampaikan baik kepada kami maupun Kementerian Keuangan. Saya kira apabila ada *roadmap* yang jelas, pas, strategis, dana di kementerian ini pasti bertambah, Pak, seperti itu. Terlepas bahwa, membangun desa itu tidak hanya melulu dari Kementerian Desa, tentu ada Kementerian dan Lembaga lain yang juga terlibat.

Namun apabila ada kolaborasi, namun apabila ada kesepakatan bersama tentu lagi-lagi kaitannya dengan dana saya punya keyakinan bahwa, dana desa maksud saya dana di Kementerian ini tidak tiap tahun menurun.

Hari ini 2,9 triliun yang hampir separuhnya hanya digunakan untuk pendamping. Teman-teman hampir bersuara yang sama, Pak, *tone*-nya sama, frekuensinya sama, nadanya sama, artinya apa keberadaan pendamping saya kira perlu dievaluasi. Kita sudah lakukan dari BPSDM kita ada catatan di sini, selalu dilakukan peningkatan kapasitas dan sekaligus kualitas tentunya untuk pendamping-pendamping profesional walaupun di pendamping profesional itu capainya sangat rendah. Mohon nanti dijelaskan juga kenapa untuk pendamping profesional itu.

Maksud saya bahwa, kita sudah hampir 3 tahun ini, Pak, 3 tahun mau 4 tahun pendamping desa. Tentu apabila dilakukan penguatan terhadap pendamping-pendamping ini secara kapasitas seyogyanya sudah 5 atau 10 desa satu orang saja. Artinya apa, anggaran-anggaran di Kemendes bisa kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan pembangunan yang lain yang banyak bermanfaat bagi rakyat.

Saya melihat ini ada kejanggalan, hampir 34 ribu 35 ribu mendampingi 84.000 sekian, tetapi setiap tahun orang-orangnya masih-masih saja seperti itu. Terlebih kemudian, ada suara-suara sumbang bahwa pendamping itu hanya mengamplifikasi partisan-partisan tertentu, ini fatal, Pak, di dalam kita bernegara.

Saya melalui staf memang tidak pernah disampaikan bahwa ada rekrutmen, ada evaluasi. Betul memang disampaikan tetapi hanya di *injury-injury time*, sementara banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat di dapil kaitannya dengan keterlibatan, kaitannya dengan partisipasi mereka-mereka yang sudah lulus kuliah dan punya potensi, serta kualifikasi yang memadai, mereka tidak bisa terlibat di dalam pendampingan-pendampingan desa.

Saya juga banyak mendengar, Pak, dari kepala desa itu banyak pendamping-pendamping yang tidak memenuhi standar mutu, *nah* kenapa ini dilakukan pembiaran kayak *gitu*. Setuju terhadap program yang Bapak dari BPSDM tadi sampaikan bahwa, ada peningkatan kapasitas supaya berkualitas, namun di sana-sini masih kami banyak mendengar bahwa mereka-mereka tidak memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan Kepala Desa seperti itu.

Nah, berikutnya, tadi Pak Sekjen sudah secara...apa namanya, Pak, secara umum saja kami sentuh ini. Ke BPSDM, halaman 9, ini jadi tanda tanya besar bagi saya ada keganjilan, Pak, halaman 9 mungkin dari apa namanya *slide* nya bisa dibuka, Pak. Oktober ke November, Oktober kisaran 70% tetapi realisasi di November 68%.

Biasanya lumrahnya ada peningkatan serapan, ini justru penurunan. Mohon digambarkan kepada saya, karena saya masih melihat ada...apa namanya agak ganjil, agak sumirlah tapi dokumen negara bisa tercatat seperti itu. Namun, apabila ada argumentasi-argumentasi yang mungkin menguatkan, barangkali bisa kami maklumi.

Yang berikutnya, terhadap Inspektorat atau Irjen, di mana Inspektorat Jenderal ini, tentu melakukan pengawasan terhadap internal utamanya di Eselon-Eselon I. Saran saya, agar kiranya bahwa, kegiatan ini tidak hanya rutinitas belaka, tetapi harus dilakukan dengan kontrol yang sangat ketat, melekat, agar penggunaan anggaran-anggaran di masing-masing Eselon tidak ada kebocoran, efektif, efisien, *accountable*.

Dan, ini barangkali yang bisa disampaikan, terima kasih atas perhatiannya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Selanjutnya Pak Syahrul, silakan Pak, yang terakhir nanti Pak Roberth, ya dari Pimpinan.

F – PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Sekjen dan Bapak-Ibu Dirjen yang saya hormati, serta
Seluruh pegawai di Kementerian Desa,**

Pertama, saya menyinggung tentang regulasi penggunaan dana desa untuk tahun 2023, sama kasusnya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya bahwasanya selalu saja ada persentase. Kenapa tidak membuat regulasi itu berdasarkan pada kriteria dan kebutuhan. Kita *tau* bahwasanya desa di Indonesia ini yang lebih dari 74 ribu itu karakternya beda-beda.

Desa A dengan Desa B berbeda, desa di Sumatera, desa di Jawa, berbeda tetapi kenapa regulasinya selalu persentase. Misalnya, ketika disebutkan BLT 10%. *Nah*, bisa saja ada desa yang tidak harus menggunakan dana desanya 10% untuk BLT, Pak. Karena saya pernah menemukan desa penduduknya itu hanya 120 orang, 120 orang, dia dapat dana desa itu 600 sampai 700 juta karena wilayahnya memang sangat-sangat terpencil. Yang dibutuhkannya adalah infrastruktur, Pak, yang dibutuhkannya adalah air minum, yang dibutuhkan yang air bersih, tetapi kalau dibuat minimal 10%, *ah* ini kan kata-kata yang seolah-olah kita terlalu mengeneralkan desa yang begitu besar, luas di Indonesia ini, ini perlu kita pikirkan lagi.

Dan, bingung *nih* teman-teman kepala desa itu bingung, awalnya keluar regulasi dari Kementerian Desa, terus keluar lagi dari Kementerian Keuangan. *Nah*, ini mohon ke depan Pimpinan, ini catatan besar bagi kita bahwasanya menjelang dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa khususnya untuk penggunaan Dana Desa 2024, ke depan ini, mohon kita bawa dalam rapat, setuju kan, ya?

Supaya kita sudah jadi baru kita pada-pada mengadu, kepala desa mengadu begini-begini-begini-begini, akhirnya aspirasi itu tidak tersam...terkabulkan. Kita berharap Pak, setiap aturan, setiap regulasi itu menyelesaikan masalah bukan menimbulkan banyak masalah. Kita pengalaman tahun 2022, itu masalah besar sekali, dipatok 40% waktu itu, 40% minimal kalau tidak dipotong dana desanya 25%, itu kan regulasi siapa yang buat ini, siapa yang buat begitu. *Nah*, sekarang memang diturunkan.

Yang di Kementerian Desa membuat minimal 10% *eh* maksimal 25%, di Kementerian Keuangan ada lagi, walaupun ada minimal maksimalnya. Begitu juga Pak, ketika kita membuat misalnya ketahanan pangan, ketahanan pangan 20% dan itu sebelum tahun sebelumnya begitu juga 20%. Pak, kalau di desa-desa *ekstran* misalnya, itu ketahanan pangan udah bagus, Pak, *nggak* perlu intervensi desa sudah bagus di sana, sudah memang daerah itu sudah desa itu sudah pusat produksinya ketahanan pangan kenapa harus desa intervensi begitu.

Maka saya sangat tidak setuju regulasinya dalam bentuk persentase, Pak, apalagi persentasenya itu dipatok tidak bergerak, tidak dinamis begitu. Cukuplah bahwasanya dana desa ini diarahkan a, b, c, ketahanan pangan. Saya setuju, bahwasanya kita perlu untuk melakukan...apa namanya ketahanan pangan, tapi tidak semua desa, Pak, desa itu kan macam-macam karakternya. Kalau sebuah masyarakat itu semuanya sudah petani, sudah menanam, masa harus masuk lagi desa, kan, *nggak* cocok, Pak.

Jadi, sekali lagi harus dibuat kriterianya, kalau BLT, kan akhirnya dipaksakan, Pak, orang yang sesungguhnya tidak layak mendapat akhirnya dipaksakan untuk dapat, untuk terpenuhinya 10%. Mohon maaf agak interaktif, di Kementerian Desa, ada *ndak* kriteria orang dapat BLT dana desa? Ada? Iya, *nggak*, ada Bang, untuk BLT Dana Desa, Kementerian Desa, ada untuk PKH untuk dari Kementerian Sosial ada lagi, di luar itu.

Harusnya kita, *nah*, saya selalu menyampaikan Pak, yang kita, ini kan penanganan kemiskinan *nih* ada dua, ada miskin yang tak mampu bekerja, itu penanganannya memang BLT, tak mampu bekerja miskin cacat, miskin sakit menahun, miskin tua renta, miskin anak-anak, itu BLT. Ada miskin yang mampu bekerja ini bentuknya adalah pemberdayaan, maka berikan kesempatan bagi mereka untuk berusaha, maka dalam hal ini saya mengusulkan ini Pak, 2024 atau revisi minimal 2024 coba Pak, dibuat regulasi agar dana desa itu memungkinkan Kepala Desa untuk membeli lahan.

Kenapa saya katakan begitu, pertama untuk meminimalisir perubahan lahan, apa istilahnya itu, alih fungsi lahan yang dari pertanian atau perkebunan menjadi perumahan dan seterusnya, satu. Yang kedua, ini menjadi, kan tidak seluruh dana...tidak semua desa itu punya tanah bengkok istilahnya itu, tanah bengkok, tidak semuanya Pak, apalagi setelah pemekaran, tidak semuanya. Maka apa yang terjadi, masyarakat desa kita, di desa yang miskin mereka itu ingin berusaha tapi tidak punya lahan, akhirnya mereka jadi apa akhirnya mereka hanya menjadi buruh di desa itu.

Kalau desa punya lahan, kemudian nanti dimodali oleh BUMDes masyarakat di situ bekerja sama dengan BUMDes, masyarakat tidak menjadi pekerja. Ini catatan penting saya, Pak, ke depan 2024 tolong dibuat regulasi memungkinkan digunakan untuk membeli lahan, terutama pertanian kita ini, Pak, banyak alih fungsinya, Pak. Lahan pertanian kita.

Kemudian, ini ada di beberapa desa saya di...disampaikan ke saya kepala desa, ada tahun 2021-2022 dana desa mereka *nggak* cair untuk triwulan terakhir, Pak, ini mereka mengadu ke mana ini, ya.

Kemudian saya setuju ini BUMDes ini sangat apa sangat-sangat vital cuma kita belum serius ini memberikan regulasi. Pertama, terkait kriteria orang yang akan duduk sebagai BUMDes, karena *fit and proper test* ya tidak...tidak kita lakukan dan baru sifatnya harus orang ada di desa, ini perlu karena yang kita harapkan adalah bagaimana membangkitkan ekonomi melalui BUMDes ini, ini memang harus dibuka secara profesional ke depannya, Pak.

Kemudian, *nah*, ini yang, sekarang pertanyaan mohon maaf interaktif. Kan judul Kementerian kita ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saya pertanyaannya sekarang apa, siapa yang bertanggung jawab atas desa tertinggal, kalau desa tertinggal. Siapa, Pak?

KETUA RAPAT:

Pak Syahrul.

F – PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Sedikit, Pak.

KETUA RAPAT:

Mungkin nanti bagus begini, Pak, ini kan kita setengah dua kita Paripurna, maksud saya kita selesaikan dulu pertanyaan.

F – PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Nggak satu *aja* pertanyaannya, satu singkat saja Pak Sekjen, singkat *aja*.

SEKJEN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si):

Di Kementerian Desa ada indeks desa membangun, Pak.

F – PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Indeks desa membangun.

SEKJEN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si):

Tiga indeks, indeks ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungan.

F – PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Nah, Maksud saya begini, Pak, saya satu *aja*, saya membayangkan kan dari 74 ribu lebih, desa ini, kan ada sekian ribu desa kita masih desa tertinggal begitu dan saya tidak melihat dalam program kerja kita, dalam penganggaran kita yang memang fokus pada desa tertinggal atau desa sangat tertinggal, justru mengambang kepada daerah tertinggal sementara anggaran kita hanya 3 triliun Pak, jadi terlalu besar yang ingin kita gapai sementara kecil, yang kecil tidak kita laksanakan.

Maksud saya kita fokus sehingga *blueprint* perencanaan kita ke depan bahwasanya tahun ini ada sekian ribu desa sangat tertinggal yang harus kita keluarkan dari ketertinggalannya, itu maksud saya, Pak.

Mudah-mudahan saya membayangkan bahwasanya ada bidang yang memang fokus untuk itu, karena kalau indeks desa membangun nanti masih tercabang juga, Pak, ini desa maju, desa mandiri dan seterusnya. Ini untuk khusus ya khusus, bahwasanya 2020...2045 misalnya Indonesia ini tidak ada lagi desa sangat tertinggal atau desa tertinggal, target kita jelas begitu.

Kemudian yang terakhir ini, Pak, ada beberapa desa eks transmigrasi yang lahan mereka ini justru masuk dalam HGU, mohon Kementerian Desa bidang hukumnya ikut campur dalam membantu teman-teman di transmigrasi, di mana lahan-lahan mereka, lahan KKPA-nya masuk dalam HGU yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga lain.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Yang terakhir dari meja, Pimpinan, Pak Roberth Rouw silakan, Pak.

F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya, terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Komisi V yang saya hormati,
Pak Sekretaris Jenderal Kementerian PDT dan seluruh jajaran.**

Saya tidak terlalu banyak, saya kira teman-teman semua sudah menyampaikan apa yang menjadi fokus kita semua bahwa kita sangat *concern* juga untuk bisa bagaimana membangun masyarakat Indonesia, kita membangun masyarakat-masyarakat yang ada di desa itu yang harus kita dengarkan.

Saya ingin agar ke depan, kita tidak lagi rapat seperti yang sudah-sudah, bahwa kita bicara 2024, itu sudah harus kita bicarakan tentang mulai dari perencanaan bersama-sama, ya, DPR bersama pemerintah, pemerintah siapa, saudara-saudara sekalian. Tidak ujug-ujug nanti kita cuman bicara Bapak-Bapak laporkan anggaran kita memutuskan selesai, selesai. Karena kita mendapat banyak sekali, ya, hal-hal yang menurut kita harus diperbaiki dan kita tidak dilarang untuk kita masuk sampai kesatuan tiga.

Maka kita harus *tau*, sama-sama kita memutuskan, karena kegagalan mitra, itu kegagalan kita, komisi, untuk bagaimana kita bersama-sama

merancang, menganggarkan untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan desa.

Jadi, saya minta sekali lagi untuk nanti, ya, tolong mulai perencanaan laporkan ke kita untuk kita rapat bersama, untuk kita membuat di dalam anggaran 2024, perencanaan seperti apa untuk 2024.

Saya kira itu, Pimpinan, dan saya minta sekali lagi, kita *tau* semua sekarang sudah kita masuk ke tahun politik, jangan kepala-kepala desa, aparat desa dipolitisasi ya, ya. Ini saya mohon ya, pada saudara-saudara karena yang bersentuhan langsung adalah saudara-saudara. Jadi, agar betul-betul murni aparat desa itu bekerja untuk kepentingan rakyat di desa bukan untuk kepentingan politik tertentu, partai-partai tertentu. Kami tidak ingin supaya aparat desa ini dilibatkan, ya kan, di dalam gonjang-ganjing politik 2024 nanti.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih, saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bapak-Ibu Anggota Komisi V.

Saya kira itu tadi, Pak, ada sekitar 11 pertanyaan dari Anggota Pak Sekjen dan saya berharap bisa dijawab dikelompokkan saja, Pak, tadi ada pertanyaan yang sama, kemudian saya berharap ini kita kan karena mau Paripurna setengah dua saya minta waktu 10 menit Pak, ya, 10 menit Pak Sekjen itu semuanya 10 menit diatur aja waktunya. Kemudian, kalau pertanyaan tadi yang sifatnya data tolong nanti dijawab secara tertulis. Ya silakan, Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si):

Baik, terima kasih.

Pertama, kami menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga atas banyak pertanyaan, masukan yang sangat berarti, sangat bermanfaat untuk kami dan sekaligus menjadi catatan kami.

Semua catatan, pertanyaan ada yang bisa kami jawab waktu hanya 10 menit, mungkin kami menganggap tidak cukup untuk meresponi banyak pertanyaan yang sangat berarti itu untuk Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, dan yang kedua, pertanyaannya akan kami susuli, data-datanya kami susuli pada waktu yang ditentukan oleh Pimpinan dan Anggota.

Yang pertama, menarik tadi pertanyaan tentang desa tertinggal. Kami ingin melanjutkan, di Kementerian Desa ada indeks desa membangun tiga parameter, indeks desa itu diukur, pertama indeks ketahanan ekonomi. Jadi, sejauh mana desa punya akses terhadap *source (suara kurang jelas)* ekonomi ada pasar desa *nggak*, apakah ada BUMDes? Literasi keuangan apakah sudah memadai di desa.

Yang kedua, indeks ketahanan sosial. Sarana prasarana umum, apakah sudah ada sekolah? Berapa lama desa bisa menjangkau mengakses fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, bagaimana integrasi sosial.

Yang ketiga, indeks ketahanan lingkungan. Sejauh mana dana desa atau sumber-sumber pendanaan desa mampu memitigasi, melindungi dan membuat desa *sustain* dari lingkungannya, itu kami ukur ada poin, ada interval, ada nilai yang kami ukur. *Nah*, kemudian ini menghasilkan 5 klaster 5 kategori desa: sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, desa mandiri.

Pertanyaan, siapa yang akan dieksekusi ini? Desa sangat tertinggal ketika infrastruktur yang terbatas, sarana pendidikan, kita bicara kewenangan. Fungsi Kementerian Desa, fungsi eksetorial, dan fungsi koordinatif. Kita mengeksekusi program ribuan desa, kami klarifikasi desa Indonesia ada 74.961 desa, *form*, itu yang punya registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dana 3 triliun tidak mungkin cukup, maka fungsi koordinatif. Siapa saja? Semua K/L harus masuk.

Yang kedua, kewenangan, kalau kewenangan desa bisa pakai dana desa, tapi kalau kewenangan di kabupaten, misalnya sekolah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi naik status desa yang sangat tertinggal menjadi tertinggal atau desa tertinggal menjadi desa yang maju, berkembang dan seterusnya. *Nah*, ini yang fungsi yang kami lakukan supaya Kementerian lain juga *tau* ada kewenangannya termasuk jajaran Pemda, bangun sekolah, bangun Puskesmas, masjid, gereja, tanggung jawab siapa, semua punya tanggung jawab.

Gubernur Kalimantan Barat, sekedar mengilustrasikan, untuk mau promosi satu desa sangat tertinggalnya desa berkembang mungkin saja butuh 20 miliar. Kalau satu tahun, satu miliar lewat dana desa, butuh 20 tahun, maka sinergitas pendanaan yang harus dikeroyok mana dana desa, mana fungsi kementerian, mana pemda kabupaten, mana tugas pemerintah provinsi, mana APBN harus masuk supaya daya sahatnya tidak 20 tahun tapi bisa lebih cepat butuh kolaborasi.

Maka Kementerian Desa di samping eksetorial dengan dana 3 triliun ada fungsi koordinatif yang kami lakukan dengan kementerian dan lembaga, itu catatan kami terkait dengan desa tertinggal tanggung jawab siapa, Pak Syahrul tadi bertanya untuk kami respon.

Yang kedua, masalah BUMDes, mohon izin pertanyaan dari Pak Hamka. Kami *tau* dan sebelum ini ada aturan, apalagi ada Undang-Undang Cipta Kerja meng-*address* langsung bahwa BUMDes.

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Izin, Pimpinan, izin Pimpinan, sedikit, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Tadi kan disebutkan desa itu 74 ribu berapa 900...961, artinya yang 80 ribu lebih itu, termasuk kelurahan. Kementerian Desa *ndak* tidak masuk di kelurahan yang ada di kabupaten *gitu* kan hanya desa.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si):

Terkait BUMDes, mohon izin, Pak Hamka mungkin *tau* selama ini Undang-Undang Cipta Kerja meng-*address* langsung merevisi Undang-Undang Desa bahwa BUMDes sebagai badan, bukan badan hukum menjadi badan hukum sehingga ekspansi usahanya ke mana-mana.

Peraturan banyak dikeluarkan oleh Kementerian Desa, harus BUMDesnya itu BUMDes yang produktif, bisa mengagregasi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan sekaligus menjadi instrumen ekonomi di desa. Pemerintah pusat hadir ini bahwa ada revitalisasi badan usaha milik desa, semua *tau* itu, kemudian di Peraturan Menteri Desa terkait dengan penggunaan dana desa, desa BUMDes harus produktif.

Nah, ini kebetulan Pak Hamka dan Bapak-Ibu sekalian kami memuliakan, kebetulan di Kementerian PU ada program Padat Karya Tunai, jadi fungsi BUMDes hanya sebagai pendukung atas program Padat Karya Tunai Desa tidak sebagai pelaksana, pelaksanaanya tetap masyarakat.

Misal-misal, dalam Padat Karya Tunai punya PUPR, butuh semen, butuh pasir, butuh material, BUMDes bisa menjadi distributornya tapi pelaksanaanya tetap kepada warga desa, itu substansi dari MoU di Pelalawan Bintan yang di tandatangani.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin, Pimpinan, interaksi sedikit.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Pak Hamka.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Ya saya paham itu, Pak Sekjen, maksud saya ini kan kalau hanya sub, artinya menyiapkan semen, apa, itu tidak ada masalah asal jangan masuk

dalam proses pengerjaannya dan laporan dari...laporan keuangan dari situ itu dari masyarakat sendiri bukan dari, bukan dari badan usaha, paham saya, Pak.

Tapi kalau sekedar mensuplai, ya, silakan *aja* bikin toko, kalau ada di situ misalnya pekerjaan irigasi mau jual semen ambil di situ, itu tidak ada masalah, tetapi semua protes...proses pertanggungjawaban keuangan IBM ini, itu masyarakat bukan badan usaha itu *loh* yang-yang saya kritisi. Saya kira kan kita sependapat di situ, Pak Sekjen, ya. Kalau misalnya ya kerikil atau apa saja ya silakan *aja*, disiapkan oleh BUMDes.

Makasih.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, Pimpinan, sedikit menyambung apa yang disampaikan Pak Hamka.

Jadi, kalau seperti itu jangan sampai kemudian ada usaha mendadak begitu, Pak. Artinya, kalau sebelumnya usahanya UMKM kemudian ketika ada itu tiba-tiba membuat usaha atau memaksakan karena sudah MoU “udah kamu ambil semennya harus dari sini”, padahal di situ sudah ada masyarakat yang jual kalau memang tidak punya usaha di bidang bangunan, jangan paksakan jangan sampai kemudian alibinya karena ini sudah kerja sama ini sudah ada aturan kemudian semua diambil.

Artinya juga menafikan masyarakat yang sudah berusaha sebelumnya begitu, kalau memang dia usahanya di bidang itu *oke* mengambilnya dari situ, tapi sekali lagi, jangan sampai memaksakan karena ada ini kemudian kamu harus usaha ini BUMDesnya.

Terima kasih, Pimpinan.

SEKJEN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.):

Kami setuju untuk menjadi catatan Bu Sri, supaya BUMDes tidak menjadi predator usaha masyarakat yang sudah ada, tidak mematikan usaha yang sudah jalankan oleh masyarakat, setuju Bu, izin.

Ada...ada tambahan sedikit dari Ibu Sri tadi, terkait dengan 404 regulasi ini diterbitkan oleh Kementerian Desa, keputusan Sekjen yang paling banyak. Mohon izin Bu Sri, dan Bapak-Ibu sekalian, kami laporkan di forum yang mulia ini itu banyak mengatur ke dalam. Misalnya, peraturan Menteri tentang SOP, tentang penetapan jabatan fungsional, pemberhentian pegawai, kenaikan pangkat, atur Perdin. *Nah*, itu semua jadi banyak, yang keluar itu kan Peraturan Menteri Desa terkait dengan dana desa atau perintah dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang BUMDes, itu saja yang dikeluarkan dan jumlahnya sedikit. Tapi, yang banyak itu menurut kami mengatur internal, *ngatur* disiplin masuk kerja masuk, mengatur pemeriksaan pegawai yang melanggar kode etik disiplin dan seterusnya itu yang banyak di sana, Bu, kami klarifikasi 404 aturannya.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, Pimpinan.

Kalau memang demikian, izin, Pimpinan. Kalau *emang* demikian kami berikan dan nanti datanya di dalam itu apa yang terkait dengan yang keluar, kalau yang ke dalam mungkin urusan *panjenenganlah* yang ke dalam tapi yang keluar menyangkut masyarakat dan desa ini kita perlu *tau*.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.):

Siap. Siap.

Kami kira cukup mungkin pertanyaan itu, yang lain data-data dan seterusnya kami akan sampaikan secara tertulis. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa atas banyak masukan yang berarti, sangat bermanfaat untuk kami tindaklanjuti.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Pendamping belum dijawab *loh*, Ketua, kita harus ada kepastian *nih* seperti apa langkahnya.

KETUA RAPAT:

Iya, dua menit, Bu, ya.

KEPALA BPSDM-PMDTT KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (Prof. Dr. LUTHFIYAH NURLAELA, M.Pd.):

Terima kasih, Bu.

Izin, Bapak, untuk rekrutmen pendamping kami me...kerjasamakan dengan perguruan tinggi, jadi yang melaksanakan rekrutmen adalah perguruan tinggi dan informasi tentang rekrutmen itu paling lambat, itu satu minggu sebelum hari H, itu sudah kami informasikan dan selama ini beberapa aspirasi sudah kami akomodasi, catatan-catatan ada di kami, aspirasi-aspirasi dari Bapak-Ibu yang terkait dengan pendamping, baik itu saat rekrutmen maupun relokasi dan seterusnya.

Nah, terkait dengan surat perintah menjalankan tugas yang baru itu adalah pada skema penugasan baru, bukan skema relokasi, tetapi meskipun begitu kami akan sangat memperhatikan masukan dari Bapak-Ibu yang menerima WA dari pendamping dan kami juga menerima langsung, baik dalam bentuk WA maupun surat-surat yang itu nanti akan kami *list* semuanya dan akan kami segera tindaklanjuti untuk hal-hal yang terkait dengan perpindahan

tempat tugas. Jadi, bukan relokasi tapi perpindahan tempat tugas kami akan segera untuk tindaklanjuti.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Interupsi, Pimpinan.

Relokasi itu ya sama ,Ibu, dengan perpindahan tempat tugas, artinya daerah yang mula-mula Sidoarjo misalnya dipindah ke Gresik itu ya relokasi namanya.

KEPALA BPSDM-PMDTT KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (Prof. Dr. LUTHFIYAH NURLAELA, M.Pd.):

Nggih, izin, Ibu. Di dalam Kepmendesa Nomor 143/2022 ada dua istilah yaitu penempatan tugas, penugasan baru. Jadi, untuk yang sekarang diangkat itu adalah skema penugasan baru. Memang ada beberapa dari TPP itu yang dia tidak di tempat tugas yang lama, tapi skemanya adalah penugasan baru.

Nah, kalau untuk nanti, dia ingin dikembalikan ke tempat yang asal, maka nanti yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan untuk relokasi, itu diatur di Kepmendesa 143.

Demikian, nanti kami akan tindaklanjuti.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Ya, memang itulah kemenangan dari eksekutif itu di situ, itulah aturan-aturan dan pada akhirnya merugikan masyarakatnya, begitu.

Maksud saya, Ibu, jangan sampai kemudian dengan adanya permintaan pindah dan seterusnya itu justru akan mempersulit bagi mereka. Kalau menurut saya karena ini masukan dari semua teman-teman, ya, udahlah direspon aja menurut saya, kecuali kalau misalnya sebenarnya mereka itu menginginkan di tempat itu tapi tidak berani untuk minta kepada Kementerian Desa, begitu.

Tolong ini betul-betul di, bukan menjadi sesuatu yang...apa, ini bukan kaitannya dengan partai politik bukan, tapi aspirasi dari mereka memang betul-betul seperti itu.

Dan, terkait dengan, Bapak, terkait mohon izin mohon maaf *nih*, memang saya tadi mau mikir bahwa jawaban ini tidak cukup di sini sehingga perlu waktu untuk-untuk kita menyampaikan sejelas-jelasnya, sehingga kita ini, apa ya, kalau sudah kalau kalau sesuatu yang kita sampaikan ini bertatap muka ini kan lebih enak ya. Oleh karena itu, mungkin suatu saat perlu Pak Pimpinan kita ketemu khusus membahas hal-hal yang memang sifatnya *urgent* begitu, termasuk tadi juga belum direspon mudah-mudahan sekarang akan direspon terkait dengan pengumuman-pengumuman yang saya sampaikan tadi tolong dijawab juga.

Makasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi begini Bapak-Ibu Komisi V, kita...saya memang tipikalnya sukanya jawaban itu langsung, Pak, tidak tertulis, kalau ini tidak Paripurna mungkin kita bisa lanjut sampai selesai, tapi karena ini Paripurna, Bu Sri, setengah dua maka kita harus segera kita akhiri.

Dan, Pak Sekjen, Ibu Kepala Badan, Pak Inspektorat Jenderal, Pak Kepala Badan, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab tolong dijawab secara tertulis, ya, agar teman-teman juga bisa merasa yang ditanyakan itu bisa terjawab. Baiklah.

Bapak-Ibu sekalian,

Ada lagi *nggak*, Pak? Udah abis ya? Udah.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan, maaf *nih*. Sebentar lagi kita ini kan udah-udah reses ya, artinya minggu depan. Kalau memang minggu depan masih ada waktu, tolong ini diundang kembali untuk kita bahas bersama khusus untuk hal yang ini tadi belum terselesaikan dengan baik, supaya kita ini enak juga, karena kita selalu aspirasi ini selalu dari bawah ketika kita turun ke desa lagi kalau aspirasi ini *ndak* terjawab, kita bisa apa yang kita lakukan begitu sebagai Anggota Dewan. Mungkin kalau minggu depan ada waktu sedikit kita alokasikan untuk...untuk beliaunya ini.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya Bu Sri, nanti setelah kita rapat dengan RDP nanti kita Raker, Raker dengan para menteri, nanti dengan Menteri Desa nanti akan kita sampaikan kembali khusus yang itu, Bu, ya tentang pendamping desa tadi, banyak rekan-rekan menanyakan hal itu. Ada lagi tidak, Pak?

SEKJEN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.):

Izin, Pimpinan.

Kan besok masih ada RDP juga dengan Direktorat Jenderal teknis ada desa pedesaan, dana desa di sana, ada transmigrasi, daerah tertinggal dan ada pengembangan ekonomi dan investasi desa, mungkin bisa.

KETUA RAPAT:

Oke, baiklah.

Bapak-Ibu, hadirin, hadirat sekalian,

Saya kira sudah dijelaskan tadi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita dan sekali lagi, Pak Sekjen, tolong dijawab secara tertulis ya pertanyaan dari Anggota yang belum sempat terjawab. Sekarang kita masuk ke draf kesimpulan pada rapat kita pada hari ini.

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Daerah Tertinggal; Transmigrasi, dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa; Daerah Tertinggal; Transmigrasi Kementerian Desa. Selasa, 7 Februari 2023.

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, dalam APBN Tahun 2022:
 - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 1. Unit organisasi Eselon I, Sekretaris Jenderal, Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar 99,61%, Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2022 sebesar 100%, luar biasa *nih* Pak, 100%.
 2. Inspektorat Jenderal, Realisasi Keuangan Tahun 2022 sebesar 97,98%, Realisasi Fisik Tahun 2022 sebesar 99,75%.
 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, realisasi keuangan sebesar 99,5%, realisasi fisik sebesar 100%; kemudian
 4. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi realisasi keuangan sebesar 95,14%, realisasi fisik sebesar 96,70%.
 - b. Terhadap program kegiatan di Tahun Anggaran 2022 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan Program Tahun 2022, sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya.
2. Komisi V DPR RI meminta Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Transmigrasi agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan saran dan masukan, serta saran dan masukan dari Anggota Komisi V.

Jadi, begitu Pak Sekjen, ya, jadi saran-saran kami tolong diperhatikan termasuk Bapak-Ibu sekalian.

3. Komisi V DPR RI meminta Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan PDT dan Transmigrasi untuk:
 - a. Menyampaikan materi dalam rapat dengar pendapat secara lebih terperinci dan transparan untuk setiap program atau kegiatan dan besaran anggarannya disertai *roadmap* yang jelas.
 - b. meningkatkan fungsi pengendalian *intern* untuk meminimalkan temuan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen dan kinerja tenaga pendamping desa.

Ini tadi yang banyak dipertanyakan, Pak, oleh teman-teman, kemudian.

- d. Memprioritaskan masyarakat lokal desa dalam rekrutmen tenaga pendamping desa.
- e. Mengoptimalkan kinerja BUMDes melalui pelatihan peningkatan kapasitas, dan terakhir
- f. Meningkatkan sistem informasi desa yang akurat dan terintegrasi.

Bapak-Ibu Anggota Komisi V,

Apakah ada yang harus direvisi?

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, Pimpinan.

Yang poin 3a itu tidak hanya *roadmap*, *roadmap* yang saja tetapi *roadmap...roadmap* dan capaian sampai dengan tahun yang bersangkutan, ya, capaian sampai dengan tahun yang bersangkutan.

KETUA RAPAT:

Sampai dengan tahun yang....

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Bersangkutan.

KETUA RAPAT:

Bersangkutan, yang berjalan kali.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Yang berjalan.

KETUA RAPAT:

Itu saja, ya, berjalan cukup ya. Ada lagi, Bapak-Ibu?

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, Pimpinan.

Tadi kan tidak hanya tenaga pendamping, ya, satunya tim apa itu namanya, koordinator ya, koordinator pendamping kan ada, mungkin itu perlu disampaikan di situ. Jadi, selain tim pendamping, juga tenaga pendamping itu ada koordinator.

KETUA RAPAT:

Poin C, ya?

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Iya, Pak.

KETUA RAPAT:

Gimana Bu Sri, coba kalimatnya, melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen dan kinerja tenaga-tenaga koordinator.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Koordinator tenaga pendamping dan tenaga pendamping.

SEKJEN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si.):

Izin, izin. Di Permen, di PP 43 itu tenaga pendamping semua namanya tenaga pendamping profesional. Jadi, kemudian di antara mereka itu mengangkat secara informal jadi koordinator, tapi semuanya itu adalah tenaga pendamping professional.

KETUA RAPAT:

Berarti tidak perlu koordinator, Pak, ya, tenaga pendamping saja. Ya, ada lagi?

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Izin, Pimpinan.

Yang C itu melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen. *Nah*, bagaimana kita *tau* ini ada proses evaluasinya. Jadi, tolong disampaikan ke kami, *gitu*, proses rekrutmen itu bagaimana gitu, satu minggu sebelumnya ada pengumuman, misalnya, perguruan tinggi mana, kerja samanya tadi sampaikan, *nah*, itu saya kira dimasukkan itu.

KETUA RAPAT:

Jadi, ada tambahan tidak, Pak? Kalimatnya poin C?

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Evaluasi itu kan kita harus *tau* hasilnya bagaimana yang dalam jangka pendek ini evaluasi terhadap hasil rekrutmen untuk disampaikan ke kami juga hasil evaluasinya itu.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Seperti itu ya, melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen dan kinerja tenaga pendamping profesional desa dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V, seperti itu ya. Itu...itu, Bu, itu *nggak* apa-apa ada profesional sesuai itu, ya, tenaga professional desa pendampingnya dihapus, tapi maksudnya paham ya.

Maksudnya itu kita itu ingin agar ke depannya itu, proses rekrutmen itu harus transparan dan jangan...jangan besok ditentukan hari ini di umumkan jangan begitu, ya. Ada lagi Bapak-Ibu? Cukup ya? Dari pemerintah bagaimana, Pak Sekjen? Setuju ya, setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu, hadirin, hadirat sekalian,

Dengan disepakatinya beberapa kesimpulan dari keputusan tersebut maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata tindakan yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat ini.

Sebelum rangkaian rapat ini ditutup kami memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah, mungkin dalam hal ini diwakilkan Pak Sekjen untuk memberikan kata penutup, silakan, Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI (TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si):

Terima kasih.

Izin kami mewakili Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan dan Informasi, serta seluruh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama yang bersama-sama dengan kami hari ini menyampaikan Terima kasih atas semua masukan, rekomendasi dan pertanyaan yang sangat berarti untuk kami sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses rapat dengar pendapat ini ada hal yang kurang berkenan.

Terima kasih.

Selamat siang,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baiklah, apabila tidak ada hal-hal yang perlu kita sampaikan lagi maka rapat dengar pendapat pada hari ini, dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.40 WIB)

JAKARTA, 7 Februari 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002